

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Sejarah mengenai berdirinya Perum Jamkrindo berawal dari kondisi perkembangan koperasi yang masih cukup tertinggal dibandingkan dengan dua pelaku ekonomi lainnya yaitu BUMN dan swasta. Pada tahun 1970 Pemerintah mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK). LJKK merupakan lembaga BUMN yang bernaung di bawah Departemen Transmigrasi, Koperasi, dan Tenaga Kerja yang memiliki tugas utama menjamin skim kredit yang disalurkan kepada koperasi. Sejak berdirinya, LJKK banyak memberikan bantuan pinjaman dana kepada koperasi-koperasi di Indonesia hingga citra koperasi di Indonesia menjadi baik. Bertujuan untuk lebih mengembangkan kemampuan keuangan koperasi sekaligus menyehatkan lembaga penjaminan, berdasarkan PP No. 51 tanggal 23 Desember 1981 tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi dibentuklah Perusahaan Umum Pengembangan Koperasi (Perum PKK).

Seiring dengan berjalannya waktu dan melihat keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas Perum PKK dalam mengembangkan koperasi melalui kegiatan Peminjaman Kredit, diterbitkanlah PP No.95 tanggal 7 November tahun 2000

tentang Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha (SPU), yaitu merupakan nama baru Perum PKK yang telah diubah dengan bertumbuhnya harapan yaitu agar dapat menjangkau sasaran tidak hanya koperasi tetapi juga memberikan pelayanan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Perum Sarana berada di bawah naungan Kantor Menteri BUMN.

Perjalanan karir Perum SPU pun semakin berkembang dan semakin sukses, hingga pada pertengahan Mei 2008, melalui Peraturan Pemerintah No. 41 tanggal 19 Mei 2008 Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha (SPU) kembali diubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Perubahan nama perusahaan tersebut terkait dengan perubahan bisnis perusahaan yang hanya terfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKMK, dan tidak lagi memberikan pinjaman secara langsung kepada UMKMK melalui pola bagi hasil seperti yang diterapkan sebelumnya saat masih bernama Perum SPU. Pada tahun 2008 pula Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 2 tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Guna melaksanakan Peraturan Presiden tersebut, diterbitkanlah kemudian Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222/PMK010/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Berdasar pada regulasi kebijakan tersebut, maka Perum Jamkrindo wajib memiliki ijin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit. Dalam menindaklanjuti PMK tersebut, Menteri Keuangan telah menerbitkan Keputusan Menteri Nomor: KEP-77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009 yang menetapkan ijin usaha Perum

Jamkrindo sebagai Perusahaan Penjamin Kredit. Lebih singkatnya mengenai sejarah perusahaan dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Sumber: www.jamkrindo.com

Gambar 4.1.
Sejarah Perum Jamkrindo

4.1.2. Visi dan Misi

Dalam mencapai cita-cita perusahaan, Perum Jamkrindo memiliki visi, yaitu “Menjadi Perusahaan Penjaminan terdepan yang mendukung perkembangan perekonomian Nasional.”

Kemudian dalam melaksanakan visinya maka dijabarkan dalam misi-misi perusahaan yang disebut “Tridharma Jamkrindo” yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan penjaminan bagi perkembangan bisnis UMKM dan Koperasi
2. Memberikan pelayanan yang luas dan berkualitas

3. Memberikan manfaat bagi *stakeholders* sesuai prinsip yang sehat

4.1.3. Tujuan Perusahaan

Sebagai salah satu perusahaan BUMN, Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) didirikan dengan tujuan untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, dengan melaksanakan penjaminan kredit bagi UMKMK.

4.1.4. Bidang Usaha

Kegiatan utama Perum Jamkrindo adalah melakukan penjaminan kredit atau pembiayaan yang diberikan bank atau badan usaha lainnya kepada Usaha Mikro Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi (UMKMK). Perum Jamkrindo bermitra dengan perbankan dan badan usaha lainnya sebagai pemberi kredit kepada UMKMK maupun kerjasama dengan mitra *co-guarantee*. Dalam menjalankan usahanya tersebut, jumlah mitra kerja Perum Jamkrindo saat ini mencapai lebih dari 65 entitas yang terdiri dari perbankan yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank BUMN, Bank Swasta Nasional dan badan usaha lainnya baik konvensional maupun syariah.

Dalam kerja sama dengan bank tersebut tidak semua produk kredit dijamin oleh Jamkrindo, melainkan penjaminan kredit umum (komersil), kredit konstruksi pengadaan barang dan jasa, kredit konsumtif, bank garansi dan sebagainya. Sedangkan fokus utama dari penjaminan yang dilaksanakan oleh Perum

Jamkrindo adalah penjaminan atas kredit Usaha Kecil Mikro dan Menengah serta Koperasi (UMKMK) yang disalurkan oleh bank kepada pelaku usaha.

4.1.5. Strategi Perusahaan

Untuk dapat mencapai tujuan perusahaan yang telah ditentukan, serta mempertimbangkan berbagai perubahan lingkungan bisnis yang sedang maupun yang akan terjadi, yang dapat menimbulkan peluang dan ancaman, Perum Jamkrindo memiliki Kredo Perusahaan yang juga merupakan strategi perusahaan, terdiri atas lima butir sebagai berikut:

1. Terpercaya dalam melaksanakan usaha penjaminan
2. Responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis
3. Unggul dan profesional dalam pelayanan
4. Sehat dalam tata kelola perusahaan
5. Terkemuka dalam memberikan kepuasan pelanggan

Dalam menjalankan strateginya untuk mencapai tujuan perusahaan sebagaimana disebutkan di atas, Perum Jamkrindo selalu menerapkan Budaya Perusahaan yang amat dibanggakan yang disebut dengan “TRUST”, yaitu:

1. Terpercaya: Bekerja jujur dengan integritas tinggi
2. Responsif: Selalu tanggap menghadapi kebutuhan mitra usaha dan segenap *stakeholders*
3. Unggul: Selalu meningkatkan profesionalisme demi pencapaian nilai tambah bagi perusahaan

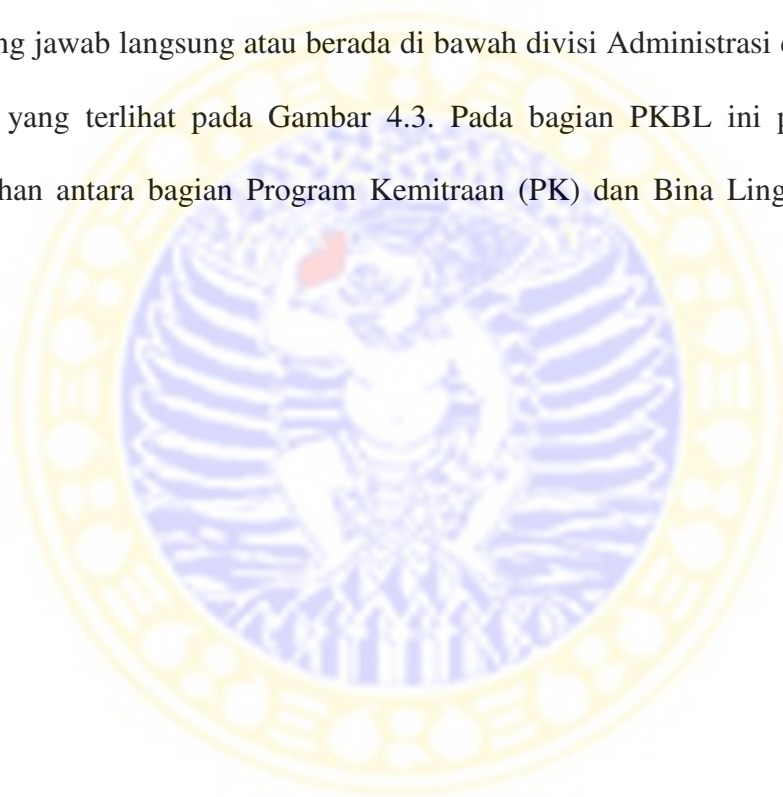
4. Sehat: Selalu bekerja dengan tekun untuk mendukung tata kelola perusahaan yang sehat
5. Terkemuka: Selalu terdepan dalam memberikan pelayanan dan kinerja menjadi pemimpin dalam industri penjaminan

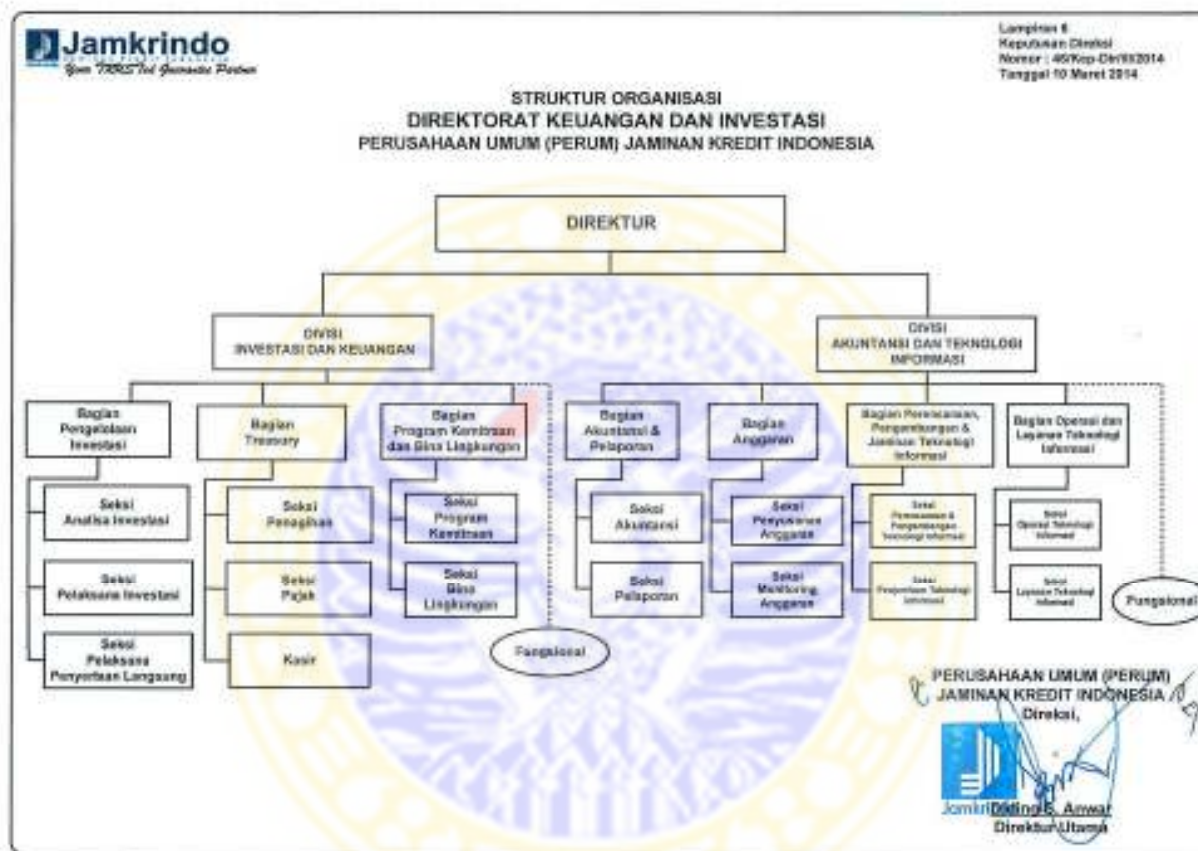
Perum Jamkrindo memiliki motto perusahaan yang mengemas secara praktis jasa penjaminan yang ditawarkannya yaitu “Solusi UMKMK Menuju Sukses”. Sedangkan untuk membentuk komunikasi perusahaan kepada para mitranya, Perum Jamkrindo memiliki *tagline* yang tetap membanggakan budaya TRUST nya, yaitu “Mitra Terpercaya dalam Penjaminan” (Your TRUSTed Guarantee Partner).

4.1.6. Struktur Organisasi

Dalam sebuah organisasi tentunya menghadapi dinamika perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Guna menghadapi dan menyikapi dinamika perubahan lingkungan tersebut tentunya diperlukan pengelolaan organisasi yang efektif, sedangkan pengelolaan suatu organisasi sangat ditentukan oleh struktur organisasi dan tata laksana organisasinya. Pada tahun 2013 dalam rangka merespon perubahan-perubahan lingkungan Perusahaan dan pencapaian bisnis jangka panjang, Perum Jamkrindo telah melakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi perusahaan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 46/Kep-Dir/III/2014 tanggal 10 Maret 2014, dinyatakan bahwa Struktur Organisasi Perum Jamkrindo terdiri atas Menteri BUMN Mewakili Pemerintah RI, Dewan Pengawas, serta Direksi. Direktur Utama yang membawahi sekretaris,

SPI, Sembilan divisi, serta Kantor-Kantor wilayah, Kantor Cabang tipe A/B/C dan Kantor Unit Pembantu. Dalam struktur organisasi Perum Jamkrindo Kantor Pusat, Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan terletak dibawah Divisi Investasi dan Keuangan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4.2. Sedangkan pada Kantor Cabang Surabaya yang merupakan Kantor Cabang tipe A, bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan tidak berdiri sendiri melainkan menjadi tanggung jawab langsung atau berada di bawah divisi Administrasi dan Keuangan seperti yang terlihat pada Gambar 4.3. Pada bagian PKBL ini pun tidak ada pemisahan antara bagian Program Kemitraan (PK) dan Bina Lingkungan (BL).





Gambar 4.2

Struktur Organisasi Kantor Pusat Perum Jamkrindo

4.2. Analisis Hasil dan Pembahasan

4.2.1. Gambaran Umum Penerapan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai *Corporate Social Responsibility*

Sejak tahun 1983 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan telah dilaksanakan di Indonesia yang pada saat itu bernama Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Persero (Persero) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1983. Kemudian terus berkembang hingga diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Bumn Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan. Peraturan ini diterbitkan karena peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri BUMN No. KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dianggap belum cukup dalam memberikan landasan operasional bagi peningkatan pelaksanaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan BUMN ini pun didukung dengan terbitnya UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada pasal 88, yang menjelaskan bahwa BUMN menyisihkan laba bersihnya untuk kepentingan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Serupa pula dengan yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2008 pasal 21 yang menjelaskan bahwa BUMN menyediakan dana yaitu penyisihan dari laba bersihnya untuk dialokasikan kepada UMKM dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.

Penjelasan mengenai *Corporate Social Responsibility* yang dikemukakan oleh Putri (2006) yang dikutip oleh Untung (2008:1), yang menyatakan bahwa CSR adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan, serta konsep 3P yang dikenalkan oleh Elkington (2006) yaitu *profit, people, planet*, sejalan dengan konsep penerapan PKBL yang dilaksanakan oleh perusahaan BUMN. Penerapan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada Perum Jamkrindo bersumber pada kebijakan unit PKBL perusahaan untuk kepentingan masyarakat serta lingkungan dan bertujuan untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan hubungan dengan masyarakat masyarakat sekitar khususnya para pengusaha UMKMK melalui program-program Kemitraan serta menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar melalui program-program Bina Lingkungan. Tomo (2008:31) mengungkapkan bahwa dilihat dari perspektif bisnis, PKBL merupakan wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya atau lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hanya saja yang membedakan adalah adanya kebijakan pemerintah yang menjadi instrumen pemaksa, maka penerapan CSR pada perusahaan BUMN menjadi hal yang wajib. Sumber dana PKBL pun berbeda dengan penerapan CSR di perusahaan swasta. PKBL memiliki sumber dana CSR dari alokasi penyisihan laba bersih perusahaan, sedangkan sumber dana CSR perusahaan swasta dibebankan langsung (sebelum pajak) atau menjadi biaya perusahaan pada periode berjalan.

Perum Jamkrindo Cabang Surabaya sebagai salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang penyedia jasa penjamin kredit telah melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sejak tahun 1993 yang pada saat itu masih dikenal dengan sebutan Program Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi (Program Pegelkop). Penerapan program ini mencakup aspek ekonomi (*profit*), lingkungan (*planet*) dan sosial (*people*).

Program Kemitraan Perum Jamkrindo Surabaya mewakili dari aspek ekonomi. Program Kemitraan (PK) ini bertujuan untuk mengembangkan dan membina para Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi (UMKM), agar meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan mengurangi pengangguran. Sedangkan dari aspek lingkungan dan sosial diwujudkan dengan program Bina Lingkungan. Pemberian dana bantuan melalui program Bina Lingkungan (BL) ini menurut Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 merupakan bantuan dalam enam jenis sektor, yaitu bantuan untuk korban bencana alam, pendidikan atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan sarana umum, sarana ibadah, serta untuk pelestarian alam. Namun dalam pelaksanaannya, Perum Jamkrindo baru menerapkan program BL dalam lima sektor. Program untuk memberikan bantuan dalam pelestarian alam belum pernah dilaksanakan hingga tahun 2014. Adapun tujuan pelaksanaan program BL ini adalah menjaga dan memberdayakan kondisi sosial masyarakat agar dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan selaras antara masyarakat sekitar.

Pada tahun 2013, dana pinjaman sebesar Rp180.000.000,00 telah disalurkan melalui Program Kemitraan oleh Perum Jamkrindo Surabaya kepada 4

mitra binaan baru yang tersebar di Surabaya, Sidoarjo, Kediri dan Mojokerto dengan jenis industri perdagangan, pertanian, peternakan dan jasa. Sangat disayangkan, jumlah mitra binaan pada tahun 2013 sangat menurun atau sebesar 75% jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang berjumlah 16 mitra binaan dengan sebaran wilayah yang berbeda pula. Pada tahun 2012 mitra binaan Jamkrindo Surabaya selain berada di daerah Surabaya dan Sidoarjo, mencakup hingga Gresik, Bangkalan bahkan Jayapura. Setelah mengalami penurunan di tahun 2013, terjadi peningkatan yang cukup baik hingga bulan Oktober 2014, yaitu Jamkrindo Surabaya kembali berhasil menambah mitra binaannya hingga memiliki 7 mitra binaan baru yang tersebar di Sidoarjo dan Ponorogo dengan total dana pinjaman yang dikucurkan sebesar Rp345.000.000,00. Peningkatan mitra binaan baru ini naik sebesar 75% dari tahun 2013 (selengkapnya lihat Tabel 4.1).

Tabel 4.1
Jumlah Mitra Binaan (Per Sektor) Perum Jamkrindo Surabaya

Sektor Usaha Mitra Binaan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
Industri	1	0	0
Perdagangan	1	1	4
Pertanian	5	1	0
Peternakan	2	1	0
Perkebunan	0	0	0
Perikanan	0	0	0
Jasa	7	1	3
Total	16	4	7

Sumber: Data internal perusahaan yang diolah

Sedangkan untuk program Bina Lingkungan, di tahun 2014 tepatnya hingga bulan Oktober, Perum Jamkrindo Surabaya telah menyalurkan dana sebesar Rp205.886.800,00 untuk bantuan pendidikan atau pelatihan, sarana ibadah, korban bencana alam, prasarana dan sarana umum dan peningkatan kesehatan. Hingga Oktober 2014 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, bantuan dana yang disalurkan melalui program BL ini mengalami penurunan dimana pada tahun 2013 Jamkrindo Surabaya mengalirkan dana bantuan sebesar Rp640.427.115,00. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang sangat besar melainkan Sembilan kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2012, karena pada tahun 2013 Perum Jamkrindo Surabaya melaksanakan BUMN BL Peduli melalui program BUMN Bangun Desa di daerah Tulungagung.

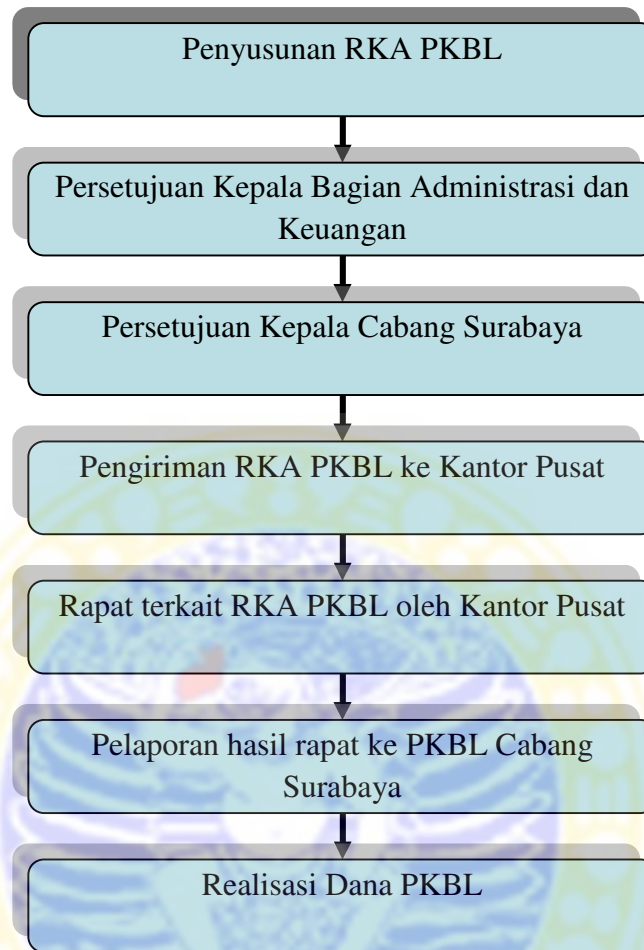
4.2.1.1. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Sebagai perusahaan BUMN, sebelum melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tentunya diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA PKBL ini disusun secara terpisah dari RKAP BUMN. Tujuan dari penyusunan RKA PKBL ini adalah untuk menjadi dasar atau acuan dalam melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada tahun yang dianggarkan. Peraturan Pemerintah pun telah mengatur mengenai pokok bahasan yang harus ada dalam RKA PKBL perusahaan BUMN sebagaimana yang tercantum dalam Per-05/MBU/2007, yaitu:

- a. Rencana kerja PK dan program BL yang dirinci menurut wilayah binaan;

- b. Anggaran PK dan BL yang terdiri dari sumber dana, dana yang tersedia dan rencana penggunaan dana sesuai dengan rencana kerja seperti yang dimaksud pada poin a;
- c. Proyeksi Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Arus Kas Program Kemitraan dan Program BL;
- d. Masalah yang dihadapi dan langkah-langkah penyelesaiannya.

Setiap tahunnya, yaitu sebelum memasuki tahun yang dianggarkan dan tepatnya pada bulan Agustus tahun berjalan, staf PKBL Perum Jamkrindo Surabaya menyusun RKA PKBL. RKA PKBL tersebut kemudian akan ditandatangani oleh Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan, berlanjut ke persetujuan Kepala Cabang Surabaya dan dikirimkan ke Kantor Pusat Jamkrindo di Jakarta. Kantor Pusat mengolah, membahas dan mengevaluasi RKA PKBL yang telah disusun oleh Kantor Cabang, selanjutnya jika disetujui dan sudah memberikan hasil rapatnya, pihak Kantor Pusat akan mentransfer dana sesuai jumlah yang disetujui, langsung ke rekening Kantor Cabang. Setelah itu, dana untuk bantuan dalam PK maupun BL pun siap dikucurkan. Proses penyusunan RKA PKBL Perum Jamkrindo Surabaya hingga realisasinya untuk tahun yang dianggarkan, dapat dilihat pada gambar 4.4.



Sumber: Olahan Penulis, 2015

Gambar 4.4
Proses Penyusunan RKA dan realisasi Dana PKBL
Tahun yang Dianggarkan

4.2.1.2. Pelaksanaan Program Kemitraan

Program Kemitraan (PK) adalah program BUMN yang merupakan pemberian dana bantuan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi (UMKM) melalui pinjaman kredit lunak dengan bunga menurun sebesar 6%. Pemberian kredit lunak ini difokuskan untuk membantu para UMKMK di Jawa Timur khususnya di sekitar Surabaya. Pada tahun 2014 hingga bulan Oktober tepatnya, mitra binaan baru Perum Jamkrindo Surabaya yang berjumlah 7 mitra

tersebar di kota Sidoarjo dan Ponorogo. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan baik pada jumlah mitra binaan baru maupun pada total dana pinjaman yang disalurkan. Namun penyebaran mitra binaan baru pada tahun 2014 lebih sempit jika dibandingkan dengan tahun 2013, dimana pada tahun sebelumnya mencakup mitra binaan yang berlokasi di kota Surabaya, Kediri, Gresik dan Mojokerto. Pada tahun 2012, penyebaran mitra binaan baru Perum Jamkrindo Surabaya lebih luas lagi hingga Bangkalan dan Jayapura. Jenis usaha UMKMK yang menjadi mitra binaan Perum Jamkrindo Surabaya pun beragam, mulai dari industri, perdagangan, peternakan, pertanian, perikanan, perkebunan dan jasa.

Melalui pengembangan peningkatan kemampuan UMKMK, Program Kemitraan yang dilaksanakan oleh Perum Jamkrindo Surabaya adalah salah satu bentuk nyata kontribusinya dalam membantu pemerintah untuk membangkitkan perekonomian serta mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat Indonesia. Perum Jamkrindo Surabaya pun memiliki tujuan sendiri dalam melaksanakan Program Kemitraan ini, yaitu ingin membantu mewujudkan UMKMK yang mandiri dan memiliki kemampuan bersaing. Perum Jamkrindo Surabaya juga berkeinginan dengan adanya Program Kemitraan ini dapat membantu mengurangi jumlah pengangguran dengan cara mengembangkan UMKMK yang potensial. Selain itu, terciptanya hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan para usaha-usaha kecil di sekitar perusahaan juga merupakan salah satu tujuan dari pelaksanaan program ini. Dalam pelaksanaannya, perusahaan BUMN yang bergerak di bidang penjaminan ini pun memiliki misi yaitu membina UMKMK

melalui penyaluran dana dan pembinaan. Namun sangat disayangkan, penyaluran dana untuk pembinaan dalam tiga tahun terakhir ini hanya disalurkan pada tahun 2012 saja dan hanya kepada satu mitra usaha.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan Program Kemitraan adalah dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2%, jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga hasil deposito dan/atau jasa giro dari dana program kemitraan setelah dikurangi beban operasional, serta pelimpahan dana program kemitraan dari BUMN lain jika ada. Adanya peningkatan dana pinjaman yang diberikan pada tahun 2014 hingga bulan Oktober, dana tersebut bukan berasal dari penyisihan laba yang diterima dari Perum Jamkrindo Kantor pusat yang melainkan hanya berasal dari saldo awal Program Kemitraan, jasa giro dan pendapatan jasa administrasi pinjaman. Sebagai kantor cabang, tentunya Jamkrindo Surabaya hanya dapat patuh pada keputusan Jamkrindo Pusat, termasuk pada pembagian jatah laba perusahaan untuk tiap-tiap cabang. Tetapi dengan dua sumber dana tersebut Jamkrindo Surabaya tetap dapat membina mitra binaan baru dan menjalin hubungan yang harmonis dengan usaha kecil sekitar.

Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan pada bab 2, sesuai dengan Per-05/MBU/2007 pasal 11 ayat (1), dana Program Kemitraan dapat diberikan melalui beberapa bentuk, yaitu pinjaman kemitraan, pinjaman khusus, dan beban pembinaan. Dalam mengelola dana Program Kemitraan selama tahun 2012 hingga Oktober tahun 2014, Jamkrindo Surabaya telah menyalurkan dana untuk pinjaman kemitraan dan beban pembinaan yang berupa hibah. Beban pembinaan berupa

hibah untuk pelaksanaan *workshop* salah satu mitra binaan telah disalurkan pada tahun 2012. Tidak adanya penyaluran dana untuk pinjaman khusus karena memang tidak adanya permintaan atau pengajuan proposal atas jenis pinjaman tersebut.

Meskipun dari awal pelaksanaan Program Kemitraan hingga sekarang Perum Jamkrindo telah memiliki 140 mitra binaan, tetapi tidak semua UMKMK yang mengajukan bantuan dana dapat mendapatkan pinjaman kredit lunak ini. Tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sesuai dengan Per.-05/MBU/2007 persyaratan untuk mengikuti program ini adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau telah memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- b. Milik Warga Negara Indonesia
- c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar.
- d. Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
- e. Memiliki potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.
- f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 tahun
- g. Belum memiliki persyaratan perbankan (*non bankable*)

Perlu dijelaskan pula, calon mitra binaan yang telah menjadi mitra binaan BUMN Pembina lain, tidak diperbolehkan mengajukan peminjaman dana. Kemudian setelah calon mitra binaan memenuhi syarat-syarat di atas, maka calon mitra binaan tersebut diperbolehkan mengajukan proposal peminjaman dana kepada staf PKBL Jamkrindo Surabaya. Proposal yang diajukan tersebut harus memuat:

- a. Pendahuluan, yang menjelaskan maksud dan tujuan pengajuan pinjaman
- b. Data diri, seperti informasi mengenai nama badan usaha, alamat, telepon, NPWP, bidang usaha, serta jumlah karyawan.
- c. Modal usaha yang dimiliki, menjelaskan tentang kepemilikan asset yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
- d. Rencana jumlah pinjaman yang diajukan
- e. Gambaran omzet atau laporan laba rugi per bulan.

Dalam pengajuan proposal, tentunya harus dilengkapi pula dengan syarat-syarat berupa lampiran untuk menyakinkan staf PKBL atas proposal pengajuan dana tersebut, seperti:

1. Foto copy KTP (dua lembar)
2. Foto copy KSK
3. Surat izin usaha atau surat keterangan dari RT & RW setempat
4. Surat keterangan mengetahui ahli waris (suami/isteri/anak/kerabat/orang lain yang disahkan sebagai ahli waris, yang pada saat realisasi harus hadir dengan membawa KTP asli)

5. Foto copy KTP ahli waris (dua lembar)
6. Surat kuasa pemilik jaminan
7. Foto copy agunan berupa BPKB atau sertifikat tanah
8. Surat pernyataan tidak sedang mendapat pinjaman dari BUMN lain
9. Pas foto peminjam dan ahli waris, ukuran 4x6 (dua lembar)

Sempat disebutkan di atas bahwa untuk mendapatkan pinjaman dan dari Program Kemitraan ini, harus disertai dengan agunan atau jaminan. Sebenarnya, tidak ada peraturan pemerintah atau pun keputusan menteri BUMN yang mengharuskan adanya agunan untuk mendapatkan pinjaman ini. Namun setelah disepakati bersama oleh perusahaan-perusahaan BUMN lain, tujuan diadakannya agunan sebagai syarat pinjaman adalah agar para mitra binaan Program Kemitraan ini dapat lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam membayar angsuran per bulan sesuai yang ada dalam perjanjian dengan BUMN Pembina.

Berdasarkan dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Perum Jamkrindo, setelah calon mitra binaan mengajukan proposal pengajuan peminjaman dana disertai syarat-syaratnya kepada bagian PKBL Jamkrindo Surabaya, maka staf PKBL akan menerima dan menganalisa proposal dan kelengkapannya tersebut. Setelah menganalisa bahwa dapat dikatakan layak, maka staf PKBL melakukan *survey* langsung ke lokasi usaha calon mitra binaan yang mengajukan proposal tersebut. Pelaksanaan *survey* ini tentunya sebelumnya tidak diketahui oleh calon mitra binaan, agar hasilnya sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya. Selama *survey* tersebut, staf PKBL mendokumentasikan foto-foto keadaan usaha calon mitra binaan guna menjadi bukti dan tentunya untuk dijadikan laporan kepada

Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan nantinya. Setelah laporan hasil survey disampaikan kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan, kemudian dilakukan penilaian dan analisa kembali atas kelayakan usaha calon mitra binaan ini berdasarkan hasil *survey* yang telah dilakukan. Hasil laporan yang mengatakan layak, akan berlanjut disampaikan ke Kepala Cabang Surabaya untuk disetujui. Selanjutnya akan diproses oleh Kantor Pusat lebih lanjut mengenai keputusan pencairan dana.

Pada tahun 2014 tepatnya sampai dengan bulan Oktober Perum Jamkrindo Surabaya selaku kantor cabang tidak mendapatkan penyisihan laba perusahaan dari Perum Jamkrindo Pusat, terkait kebijakan perusahaan. Dalam penyaluran dana pinjaman Program Kemitraan tentunya penyisihan laba perusahaan bukanlah satu-satunya sumber dana yang dimiliki. Pada tahun 2014 Perum Jamkrindo Surabaya tetap dapat melaksanakan Program Kemitraan yang dananya bersumber dari saldo akhir Program Kemitraan tahun lalu, pendapatan jasa administrasi pinjaman, jasa giro dan pengembalian pokok pinjaman. Dengan sumber dana tersebut, hingga bulan Oktober pada tahun 2014 Perum Jamkrindo Surabaya telah menyalurkan dana pinjaman melalui Program Kemitraan sebesar Rp345.000.000,00. Jumlah itu tentunya sangat meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah Rp180.000.000,00 dengan 4 mitra binaan baru. Pada tahun 2013 pun Perum Jamkrindo Surabaya tidak memiliki penyisihan laba perusahaan. Peningkatan jumlah dana pinjaman pada tahun 2014 juga disebabkan karena meningkatnya pengajuan proposal pinjaman kemitraan yang pada akhirnya Perum Jamkrindo Surabaya memiliki 7 mitra

binaan baru di tahun ini. Jika dilihat dari tahun 2012, pada tahun tersebut kantor cabang Surabaya mendapatkan penyisihan laba perusahaan yang cukup besar dari kantor pusat yaitu Rp1.440.000.000,00, yakni Rp1.000.000.000,00 untuk Program Kemitraan dan Rp440.000.000,00 untuk program Bina Lingkungan (tabel 4.3). Dengan adanya penyisihan laba perusahaan yang cukup besar ini tentunya perusahaan dapat membina mitra binaan lebih banyak, yaitu terdapat 12 mitra binaan baru pada tahun 2012. Pada tahun 2012 Perum Jamkrindo juga memberikan dana hibah yang termasuk dalam beban pembinaan kepada salah satu mitra binaan. Realisasi penyaluran dana Program Kemitraan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.3
Penyisihan Laba Perusahaan untuk Program Kemitraan

No.	Tahun	Penyisihan Laba dari Kantor Pusat	Penyaluran
1	2012	1,000,000,000.00	1,406,500,000.00
2	2013	-	180,000,000.00
3	2014 (s.d. Okt)	-	345,000,000.00
	Jumlah	1,000,000,000.00	1,931,500,000.00

Sumber: Data internal perusahaan yang diolah

Tabel 4.4
Penyaluran Dana Pinjaman Program Kemitraan

	2012	2013	2014 (s.d. Okt)
<u>Sektor Usaha</u>			
Industri	50,000,000.00	-	-
Perdagangan	50,000,000.00	40,000,000.00	195,000,000.00
Pertanian	900,000,000.00	50,000,000.00	-
Peternakan	100,000,000.00	50,000,000.00	-
Perkebunan	-	-	-
Perikanan	-	-	-
Jasa	305,000,000.00	40,000,000.00	150,000,000.00
Lainnya	-	-	-
Jumlah Pinjaman	1,405,000,000.00	180,000,000.00	345,000,000.00
<u>Dana Pembinaan</u>	1,500,000.00	-	-
Jumlah	1,406,500,000.00	180,000,000.00	345,000,000.00

Sumber: Data internal perusahaan yang diolah

Setelah mitra binaan menerima dana pinjaman dari Perum Jamkrindo Surabaya, tentunya kemudian para mitra memiliki kewajiban untuk membayar angsuran pengembalian pinjaman setiap bulan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan perusahaan. Pelunasan pinjaman memiliki jangka waktu dua tahun atau melalui 24 kali angsuran. Program Kemitraan yang dilaksanakan oleh Perum Jamkrindo menerapkan cara pembayaran angsuran secara manual, yaitu mitra binaan membayarkannya melalui bank, atau langsung datang ke Perum Jamkrindo untuk membayarkannya ke staf PKBL. Pembayaran melalui bank hanya dapat dilakukan melalui Bank Mandiri saja. Pada perjanjian awal telah dicantumkan nomor rekening Program Kemitraan perusahaan, maka mitra binaan dapat langsung *men-transfer* angsurannya ke rekening tersebut atau menyetorkannya melalui *teller* Bank Mandiri. Mitra binaan yang telah melunasi

pokok pinjaman beserta jasa administrasi pinjamannya akan mendapatkan bukti pelunasan beserta dengan rincian daftar piutang yang berisi tanggal angsuran mitra binaan, jumlah yang telah dibayarkan dan saldo pinjaman yang masih harus dibayar. Dengan telah lunasnya pinjaman maka angsuran yang dijaminakan sebelumnya dapat diserahkan kembali kepada mitra binaan.

Sebagai pemberi dana pinjaman atau sebagai BUMN Pembina, Perum Jamkrindo Surabaya juga memiliki kewajiban untuk memantau dan membina para UMKMK yang menjadi mitra binaan. Pada pelaksanaan kewajiban ini, staf PKBL mengunjungi lokasi usaha mitra binaan untuk melihat bagaimana perkembangan kondisi usahanya. Pemantauan atau *monitoring* ini dilakukan pada seluruh mitra binaan. Kemudian *monitoring* juga dilakukan terhadap angsuran pinjaman mitra binaan. Tentunya dalam pembayaran angsuran, tidak semua mitra binaan membayarkannya secara tepat waktu dan lancar dan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. Hal ini nantinya akan mempengaruhi tingkat kualitas pinjaman dana Program Kemitraan Perum Jamkrindo Surabaya. Kualitas pinjaman dana dinilai berdasarkan ketepatan waktu pembayaran kembali pokok pinjaman beserta jasa administrasi pinjaman oleh mitra binaan. Kualitas pinjaman dana ini nantinya dapat menjadi indikator kinerja Program Kemitraan dan berhubungan dengan citra perusahaan nantinya, karena kinerja Program Kemitraan merupakan salah satu indikator penilaian kesehatan Perum Jamkrindo Surabaya sebagai BUMN Pembina. Adapun kualitas pinjaman terbagi menjadi 4 golongan menurut Per-05/MBU/2007 yang diterapkan pula oleh Perum Jamkrindo Surabaya, yaitu:

1. Lancar, yaitu pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran yang telah ditetapkan dalam perjanjian sebelumnya.
2. Kurang Lancar, terjadi keterlambatan angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman telah melampaui 30 hari dan belum melampaui 180 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran yang telah ditetapkan dalam perjanjian sebelumnya.
3. Diragukan, terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman antara 181-270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran yang telah ditetapkan dalam perjanjian sebelumnya.
4. Macet, terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran yang telah ditetapkan dalam perjanjian sebelumnya.

Tentunya selaku pemberi pinjaman, staf PKBL Perum Jamkrindo Surabaya berupaya untuk mengurangi adanya piutang kurang lancar, diragukan serta piutang macet. Upaya pertama yang dilakukan staf PKBL adalah menelepon para mitra binaan yang tergolong dalam kategori-kategori piutang tersebut. Staf PKBL berusaha mencari informasi mengenai penyebab terlambatnya pembayaran angsuran, menanyakan perkembangan usahanya, apakah ada kendala, kemudian melakukan penjadwalan ulang atas kewajiban angsuran pinjaman mitra binaan

tersebut. Namun jika setelah tiga kali upaya melalui telepon tetapi mitra binaan tetap belum juga membayar angsuran pinjamannya, maka staf PKBL akan mengirimkan surat peringatan mengenai tunggakan pinjaman mitra binaan tersebut, beserta rincian saldo yang harus dilunasi. Jika dirasa perlu, maka staf PKBL akan mendatangi lokasi usaha mitra binaan tersebut untuk dapat bertemu langsung dengan mitra dan dapat memberi dorongan agar mitra membayar angsuran pinjaman serta terus menjalankan usahanya. Untuk kategori piutang macet yang telah dilakukan upaya melalui telepon hingga mendatangi lokasi usaha namun tidak juga dapat terpulihkan, maka piutang tersebut akan dikelompokkan ke dalam pos piutang bermasalah. Piutang macet tersebut tidak akan dihapuskan dan akan terus dilakukan penagihan terhadap mitra binaan yang bersangkutan, karena agunan yang telah dijaminkan pun masih berada di Perum Jamkrindo Surabaya. Perlu diingat kembali, adanya agunan adalah bertujuan untuk dapat membuat para mitra binaan disiplin dalam membayar angsuran pinjamannya.

Selain memberikan pinjaman dana kepada para UMKMK mitra binaan, Perum Jamkrindo Surabaya juga melaksanakan kegiatan yang mendukung serta menunjang perkembangan usaha mitra binaannya. Kegiatan tersebut didanai melalui dana hibah yang sebelumnya telah dijelaskan yaitu masuk dalam beban pembinaan.

4.2.1.3. Evaluasi Pelaksanaan Program Kemitraan (PK) Perum Jamkrindo Kantor Cabang Surabaya

Pelaksanaan Program Kemitraan oleh Perum Jamkrindo Surabaya yang telah memiliki 140 mitra binaan ini memiliki beberapa poin untuk dievaluasi. Selama tiga periode terakhir ini, evaluasi tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Dilihat dari peningkatan jumlah dana pinjaman yang dikeluarkan dan mitra binaan baru dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup baik.
2. Penyebaran mitra binaan baru cenderung hanya di daerah Surabaya dan Sidoarjo saja. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang memiliki penyebaran mitra binaan baru yang lebih luas.
3. Perum Jamkrindo cenderung hanya berfokus memberikan dana pinjaman modal usaha saja. Hal ini sangat disayangkan, karena sebenarnya dengan mengikutsertakan para mitra binaan atau memberi pelatihan-pelatihan kepada mitra binaan dapat menjadi salah satu upaya agar mengurangi timbulnya piutang kurang lancar, piutang diragukan serta piutang macet selain dengan upaya-upaya yang telah dijelaskan sebelumnya.
4. Kewajiban untuk memonitor perkembangan usaha mitra binaan setelah mendapat bantuan dana PK belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini nampaknya akan sulit dilaksanakan mengingat mitra binaan yang terlalu banyak dan sumber daya manusia yang hanya berjumlah satu orang di unit PKBL Perum Jamkrindo Surabaya.

4.2.1.4. Pelaksanaan Program Bina Lingkungan

Bina Lingkungan merupakan wujud lain pertanggungjawaban sosial perusahaan BUMN selain Program Kemitraan. Bina lingkungan adalah program yang dilaksanakan oleh perusahaan BUMN dengan tujuan pemberdayaan lingkungan dan kondisi sosial masyarakat khususnya sekitar perusahaan, melalui pemanfaatan penyisihan laba perusahaan. Pelaksanaan program Bina Lingkungan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Adapula menurut Perum Jamkrindo Surabaya, Program Bina Lingkungan adalah suatu program wajib yang dilaksanakan untuk membantu pemerintah mengabdikan kepada masyarakat. Program Bina Lingkungan yang dilaksanakan berfokus kepada lingkungan dan masyarakat sekitar Perum Jamkrindo Surabaya yang berada di daerah Juanda, yaitu sekitar kota Surabaya dan Sidoarjo. Di samping menjalankan kewajiban, pelaksanaan Bina lingkungan ini bertujuan agar terciptanya kondisi sosial yang harmonis antara Perum Jamkrindo dengan masyarakat sekitarnya.

Sama halnya dengan Program Kemitraan, sumber dana program Bina Lingkungan juga berasal dari penyisihan laba setelah pajak maksimal 2%, saldo awal tahun program Bina Lingkungan serta hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana program Bina Lingkungan. Namun selaku kantor cabang, Perum Jamkrindo Surabaya hanya dapat menunggu keputusan dari kantor pusat berapa besar jumlah dana yang disisihkan baik untuk Program Kemitraan maupun Bina Lingkungan. Pada umumnya, setiap tahun berjalan penyaluran dana Bina

Lingkungan dibagi menjadi dua program, yaitu program Bina Lingkungan BUMN Pembina dan program Bina Lingkungan BUMN Peduli.

a. Program Bina Lingkungan BUMN Pembina

Bertujuan untuk membantu memberdayakan kondisi sosial dan menciptakan hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar, hingga bulan Oktober di tahun 2014 Perum Jamkrindo Surabaya telah menyalurkan dana sebesar Rp205.886.800,00 dalam program Bina Lingkungan BUMN Pembina. Dana yang disalurkan hingga bulan Oktober pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 31,37% dari anggaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2014. Pada tahun ini memang Kantor Cabang tidak mendapatkan penyisihan laba perusahaan dari kantor pusat, namun Bina Lingkungan BUMN Pembina tetap dapat dilaksanakan yaitu berasal dari saldo awal Bina Lingkungan yang merupakan sisa dana dari pelaksanaan Bina Lingkungan tahun sebelumnya, dan dari penerimaan jasa giro. Pelaksanaan program Bina Lingkungan ini ditargetkan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang dapat membantu memberikan manfaat kehidupan dan lingkungan bagi masyarakat sekitar. Dari enam sasaran ruang lingkup program Bina Lingkungan berdasarkan Per-05/MBU/2207 yang telah disebutkan sebelumnya, Perum Jamkrindo Surabaya telah menjalankan program Bina Lingkungan Pembina yang mencakup lima sasaran, yaitu:

1. Bantuan korban bencana alam
2. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan
3. Bantuan peningkatan kesehatan

4. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum
5. Bantuan sarana ibadah

Penyaluran dana bantuan untuk korban bencana alam tentunya bertujuan untuk membantu meringankan beban para korban atas bencana alam yang terjadi, sekaligus menunjukkan rasa kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Perum Jamkrindo telah menyalurkan dana bantuan bagi korban bencana Gunung Kelud di Kediri, Jawa Timur pada 14 Februari 2014. Penyaluran bantuan ini bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia dengan memberikan bantuan berupa bantuan pangan langsung kepada para korban. Namun dalam pelaporannya, Perum Jamkrindo Surabaya mengategorikannya bukan sebagai bantuan korban bencana alam melainkan bantuan pangan langsung.

Kemudian Perum Jamkrindo Surabaya juga menyalurkan dana bantuan untuk bidang pendidikan dan/atau pelatihan dengan tujuan untuk mengurangi keterbelakangan akan ilmu pengetahuan dan secara tidak langsung dapat membantu mengurangi kemiskinan, khususnya di masyarakat sekitar di Jawa Timur. Bentuk bantuan penyaluran dana untuk pendidikan dan/atau pelatihan yang telah dilaksanakan Perum Jamkrindo dari tahun 2012 hingga Oktober 2014 adalah sebagai berikut:

1. Bantuan dana untuk pelaksanaan acara/kegiatan sekolah/universitas
2. Bantuan dana untuk pembinaan Paskibraka sekolah
3. Bantuan pengadaan peralatan pendidikan berupa Komputer dan *Handycam* untuk Pondok Pesantren

4. Pemberian dana pendidikan bagi para siswa/i berprestasi (program Indonesia Future Leader program ke Amerika Serikat).

Sedangkan bantuan dana yang disalurkan untuk peningkatan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar agar terciptanya kesejahteraan. Bantuan peningkatan kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Perum Jamkrindo Surabaya dari tahun 2012 hingga Oktober 2014 adalah sebagai berikut:

1. Pemberian sembako ke warga sekitar
2. Pembagian takjil untuk Musafir saat bulan Ramadhan
3. Buka puasa bersama anak yatim
4. Pemberian santunan kepada Takmir Masjid, anak yatim dan kaum dhu'afa.

Pengembangan prasarana dan/atau sarana umum juga menjadi target sasaran program Bina Lingkungan yang dilaksanakan oleh Perum Jamkrindo Surabaya. Tujuan pemberian bantuan dalam pengembangan prasarana dan/atau sarana umum adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas fasilitas umum sehingga dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat sekitar. Bentuk bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum yang telah dilaksanakan oleh Perum Jamkrindo Surabaya dari tahun 2012 hingga Oktober 2014 adalah sebagai berikut:

1. Bantuan untuk pembangunan gedung sekolah, Taman Pendidikan Al-Quran dan pondok pesantren
2. Pembangunan Balai RW

3. Bantuan berupa bahan bangunan untuk pembangunan desa
4. BUMN Bangun Desa

Penyaluran dana bantuan untuk sarana ibadah juga telah dilaksanakan oleh Perum Jamkrindo melalui Program Bina lingkungan BUMN Pembina dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ibadah sehingga terciptanya kenyamanan dalam beribadah, dan sekaligus menciptakan komunitas yang religius guna terciptanya keharmonisan dalam masyarakat. Bantuan untuk sarana ibadah yang telah dilaksanakan oleh Perum Jamkrindo Surabaya dari tahun 2012 hingga Oktober 2014 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Mushola dan Masjid
2. Renovasi Mushola dan Masjid
3. Santunan untuk anak yatim dalam acara peringatan hari besar Agama.

Sampai saat ini Perum Jamkrindo Surabaya telah banyak melakukan penyaluran dana bantuan untuk kegiatan-kegiatan sosial masyarakat dan lingkungan yang tentunya diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Penyaluran bantuan melalui program Bina Lingkungan ini tentunya harus melewati prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hampir sama dengan prosedur Program Kemitraan, awalnya adalah calon penerima bantuan atau pemohon mengajukan proposal permohonan bantuan dana kepada staf PKBL Perum Jamkrindo Surabaya. Setelah proposal sampai ke staf PKBL, maka selanjutnya dilakukan analisa. Jika sekiranya perlu dilakukan *survey* ke lokasi pemohon maka staf PKBL akan melakukan *survey* dan mendokumentasikannya.

Kemudian hasil analisa dan dokumentasi diberikan kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan. Jika setelah melakukan analisa kembali dan kemudian Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan telah menyetujui dan meng-*acc* pengajuan tersebut, maka berlanjut ke Kepala Cabang. Jumlah yang disalurkan kepada pemohon, sepenuhnya keputusan dari Kepala Cabang. Ketika Kepala Cabang sudah menyetujui, barulah dana tersebut dapat direalisasikan. Karena Bina Lingkungan adalah sejenis program hibah untuk masyarakat, maka tidak diperlukan agunan dalam pengajuannya. Untuk mengambil dana bantuan terdapat beberapa persyaratan, yaitu:

1. Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Kartu Pelajar)
2. Kuitansi yang telah diberi cap organisasi atau lembaga terkait
3. Materai 6000

Penyaluran dana Bina Lingkungan dapat diambil sendiri oleh pemohon atau diantarkan langsung untuk kegiatan yang mengharuskan staf PKBL mengikuti kegiatan tersebut seperti sumbangan pangan langsung keada korban bencana alam, santunan anak yatim piatu, dan sebagainya. Penyaluran dana Bina Lingkungan pun tak sepenuhnya berjalan lancar, karena ada pemohon yang sudah dinyatakan bahwa proposalnya telah disetujui dan dana telah dicairkan, namun tak juga datang untuk mengambil dana tersebut. Dalam kondisi ini, staf PKBL Jamkrindo Surabaya harus mengantarkan dana tersebut langsung ke pemohon. Hal ini terkait prosedur, yang menyatakan bahwa dana yang telah ditarik dari rekening tidak boleh dikembalikan lagi ke rekening yang sama.

b. Program Bina Lingkungan BUMN Peduli

Berdasar pada Per.05/MBU/2007 yang menyatakan bahwa Program Bina Lingkungan BUMN Peduli adalah program Bina Lingkungan yang pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama antar BUMN dan pelaksanaannya ditetapkan dan dikoordinir oleh Menteri. Maka program Bina Lingkungan BUMN Peduli baru dapat dilaksanakan jika sudah mendapat surat dari Menteri BUMN. Sesuai dengan surat Menteri Negara BUMN dengan nomor S-648/MBU/ 2012, Perusahaan BUMN diharapkan dapat menjadi ujung tombak Program Penanganan Kawasan Miskin dan Pengentasan Kemiskinan dengan salah satu caranya melalui program BUMN Bangun Desa. Program BUMN bangun Desa ini memiliki target yaitu desa/kota yang masyarakatnya sangat miskin. Dalam pelaksanaannya, BUMN Bangun Desa mencakup delapan sektor, yaitu:

1. Sektor bencana alam
2. Sektor pendidikan
3. Sektor kesehatan
4. Sektor pelestarian lingkungan
5. Sektor daerah tertinggal
6. Sektor pulau-pulau pebatasan/terpencil
7. Sektor sarana dan prasarana umum/ rumah layak huni
8. Sektor pasar murah

Pada awalnya, Menteri Negara BUMN melalui surat keputusan akan menetapkan koordinatior BUMN BL Peduli yang masing-masing mewakili setiap sektor yang disebutkan di atas. Bila dalam satu sektor terdiri dari beberapa

perusahaan BUMN, maka akan ditunjuk salah satunya untuk menjadi Koordinator yang bertugas untuk mengkoordinasikan BUMN Pembina lainnya dalam sektor yang sama. Pelaksanaan BUMN BL Peduli ini dapat melalui dua cara, pertama perusahaan BUMN Pembina mengirimkan surat resmi ke Kementerian Negara BUMN untuk meminta persetujuan atas kegiatan yang hendak dilaksanakan. Atau yang kedua, Kementerian Negara BUMN menunjuk dan memerintahkan perusahaan BUMN Pembina untuk melaksanakan program BUMN BL Peduli berdasarkan sektor-sektor yang ditentukan.

Dalam tiga tahun terakhir ini, Perum Jamkrindo Surabaya mengajukan surat resmi ke Kementerian Negara BUMN mengenai hal BUMN Bangun Desa. Kemudian Menteri Negara BUMN menyetujui, dan tepatnya pada bulan Agustus 2013, BUMN Bangun Desa dilaksanakan di Desa Dono, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Dana sebesar Rp348.190.000,00 telah disalurkan untuk membantu dalam pembangunan desa ini. Dalam pelaksanaan BUMN Bangun Desa kali ini, Perum Jamkrindo Surabaya melaksanakan BUMN BL Peduli dalam sektor sarana dan prasarana umum yang pada kali ini tidak bersinergi dengan BUMN lain sehingga tidak diperlukan adanya BUMN Koordinator. Pembangunan di Desa Dono ini terdiri dari dua kegiatan, yaitu pembangunan jembatan desa yang menghubungkan Dusun Wonong dan Dusun Dawung. Pembangunan jembatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperlancar arus lalu lintas, ekonomi dan pemerintahan di Desa Dono. Kegiatan bangun desa yang kedua adalah pembuatan bak penampungan air dan perpipaan. Tujuan dari pembangunan ini adalah agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Desa Dono dalam

perairan ke dusun-dusun setempat. Secara keseluruhan, BUMN Bangun Desa yang dilaksanakan oleh Perum Jamkrindo ini bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa Dono.

4.2.1.5. Evaluasi Pelaksanaan Program Bina Lingkungan (BL) Perum Jamkrindo Kantor Cabang Surabaya

Selama tiga tahun terakhir ini Perum Jamkrindo telah mengalirkan dana bantuan melalui program Bina Lingkungan untuk membantu para masyarakat sekitar agar tercipta lingkungan hidup yang lebih harmonis. Terdapat beberapa evaluasi atas pelaksanaan program Bina Lingkungan yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program Bina Lingkungan memiliki penyisahan dana yang lebih banyak oleh perusahaan. Daerah yang diberikan bantuan pun tersebar luas di wilayah Jawa Timur. Namun dalam pelaksanaannya, Perum Jamkrindo Surabaya kurang memerhatikan pelestarian alam. Hal ini dilihat dari belum adanya pelaksanaan Bina Lingkungan untuk menjaga dan melestarikan alam, seperti penghijauan, penanaman pohon atau sejenisnya.
2. Ditinjau dari jumlah dana yang disalurkan untuk Bina Lingkungan, dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan, namun Perum Jamkrindo Surabaya berhasil menyalurkan dana bantuan Bina Lingkungan kepada lebih banyak penerima serta lokasi yang lebih tersebar dibanding tahun lalu.

3. Sesuai dengan enam sasaran ruang lingkup program Bina Lingkungan BUMN Pembina yang tercantum pada Per-05/MBU/2007, aspek keenam yaitu pelestarian lingkungan belum pernah dilaksanakan.
4. Jika dilihat dari segi pertanggungjawaban sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) pelaksanaan Bina Lingkungan yang telah dilaksanakan oleh Perum Jamkrindo Surabaya telah mencakup dua aspek dari *triple bottom line*, yaitu aspek *people* yang telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian aspek *planet* telah dilaksanakan melalui BUMN Bangun Desa dengan membangun perpipaian dan penampungan air untuk menghemat sumber daya alam.

4.3. Evaluasi Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perum Jamkrindo Kanca Surabaya Sebagai Bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pelaksanaan CSR adalah wujud dari kepedulian perusahaan kepada lingkungan sekitar. Pengertian dari CSR sendiri dapat berarti sebuah kegiatan perusahaan agar dapat bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Tak hanya sebuah kepedulian, namun CSR adalah sebuah komitmen berkelanjutan untuk ikut berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi dengan tanggung jawab sosial perusahaan serta terjadi keseimbangan antara ekonomi, sosial dan lingkungan. Hal ini sangat sesuai dengan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang

dilakukan oleh Perusahaan BUMN. Kepedulian perusahaan terhadap aspek ekonomi diwujudkan dalam pelaksanaan Program Kemitraan (PK) dan kepedulian terhadap aspek sosial serta lingkungan diwujudkan melalui program Bina Lingkungan (BL). Evaluasi pelaksanaan PKBL sebagai bentuk CSR dapat ditinjau dari konsep, ruang lingkup dan pencapaian tujuannya.

4.3.1. Penerapan Konsep CSR Dalam Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perum Jamkrindo Surabaya

Konsep “3P” yaitu *profit*, *people* dan *planet*, menjadi konsep dasar atas pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa dikenal dengan *Corporate Social Responsibility*. Tentu saja pelaksanaan PKBL oleh Perum Jamkrindo Kanca Surabaya sebagai bentuk peduli Perusahaan BUMN dengan lingkungan dan masyarakat sekitar, juga mencakup ketiga dasar yang diterapkan dalam CSR ini. Tujuan utama pelaksanaan bisnis oleh Perusahaan Umum bukanlah untuk mencari untung semata (*profit*), namun seiring dengan pelaksanaan bisnisnya Perusahaan melaksanakan PKBL untuk menyeimbangkan antara ekonomi, sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*). Evaluasi Penerapan “3P” dalam pelaksanaan PKBL dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aspek *profit* telah disalurkan melalui Program Kemitraan. Disamping mencari keuntungan, perusahaan telah memberikan pinjaman kemitraan berbunga rendah yang bertujuan untuk memajukan UMKMK dan mengurangi

pengangguran serta secara tidak langsung merupakan program yang membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

2. Kemudian aspek *people* yaitu memperhatikan masyarakat sekitar dan berusaha meningkatkan kesejahteraan dengan membangun hubungan yang harmonis telah dilaksanakan melalui program Bina Lingkungan.
3. Seharusnya program Bina Lingkungan pun mencakup aspek ketiga yaitu *planet*. Dengan 6 target pelaksanaan Bina Lingkungan yang telah dijelaskan sebelumnya, target ke enam yaitu pelestarian alam adalah bentuk dari kepedulian akan lingkungan (*planet*). Walaupun program Bina lingkungan telah lama dilaksanakan, Perum Jamkrindo Surabaya belum menerapkan poin ini.

4.3.2. Evaluasi Penerapan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) oleh Perum Jamkrindo Surabaya Dalam Ruang Lingkup CSR

Penerapan *Corporate Social Responsibility* terbagi dalam 3 aspek ruang lingkup yang disebut dengan *Triple Bottom* yaitu meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (*Economic Prosperity*), peningkatan kualitas lingkungan (*Environmental Quality*), dan keadilan sosial (*Social Justice*). Sama seperti penjelasan di atas, dalam pelaksanaan PKBL yang dilaksanakan oleh perusahaan BUMN menerapkan konsep “3P” yaitu *profit*, *people*, dan *planet*. Evaluasi penerapan PKBL dalam ruang lingkup CSR secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konsep pertama yaitu *profit* mencakup lingkup kemakmuran ekonomi (*Economic Prosperity*) telah dilaksanakan oleh unit PKBL Perum Jamkrindo Kanca Surabaya melalui Program Kemitraan yang bertujuan untuk membantu UMKMK yang *feasible* namun belum *bankable* untuk mendapatkan fasilitas pinjaman sehingga dapat mengembangkan usahanya.
2. Kemudian konsep *people* yang mencakup lingkup keadilan sosial (*Social Justice*) dilaksanakan oleh unit PKBL Perum Jamkrindo Kanca Surabaya melalui Program Bina Lingkungan yang bertujuan untuk membantu menyejahterakan masyarakat sekitar dan meberdayakan kondisi sosial masyarakat.
3. Konsep *planet* belum diterapkan oleh Perum Jamkrindo Kanca Surabaya. Seharusnya konsep ini mencakup lingkup kualitas lingkungan (*Environmental Quality*) melalui pelaksanaan Bina Lingkungan seperti pelestarian alam, penghematan sumber daya alam, dan sebagainya. Selama ini Perum Jamkrindo lebih berfokus di ruang lingkup lain dan kurang memerhatikan alam sekitar.

4.3.3. Evaluasi Pencapaian Tujuan Pelaksanaan CSR Dalam Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) oleh Perum Jamkrindo Surabaya

Tujuan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dalam dunia bisnis menurut Hadiwidjojo (2008) adalah; (1) sebagai bagian dari strategi integral perusahaan untuk membantu menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan yang terjadi di tengah masyarakat; (2) menyebarluaskan program-program inovatif dan

penerapan *Corporate Social Responsibility* terbaik; (3) mengidentifikasi isu-isu utama yang berhubungan dengan aspek sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan segala perusahaan; (4) membangun kegiatan *public-private partnership* untuk mengurangi kemiskinan dan pelestarian lingkungan.

Sejalan dengan tujuan pelaksanaan CSR, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang telah dilaksanakan oleh Perum Jamkrindo Kanca Surabaya ini merupakan sebuah upaya BUMN untuk mendukung program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Miliki Negara pasal 2 ayat (1) huruf e yaitu turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

4.4. Pelaporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perum Jamkrindo Kantor Cabang Surabaya

4.4.1. Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Kewajiban setelah melaksanakan kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan bagi BUMN Pembina adalah melakukan pembukuan atas kegiatan yang telah dilaksanakan dan melaporkannya dalam laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN Pembina. Pembuatan laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan PKBL kepada Menteri Negara BUMN serta *stakeholders*, dan juga sebagai wujud penerapan

praktik bisnis yang sehat. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari penyusunan dan penyajian laporan keuangan PKBL menurut pedoman akuntansi PKBL yang telah dijelaskan pada bab 2, yaitu untuk memberikan informasi yang relevan dalam memenuhi kepentingan BUMN Pembina, pemerintah, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi unit PKBL. Selain itu, penyajian laporan keuangan PKBL yang dilaksanakan oleh Perum Jamkrindo Surabaya juga berperan untuk:

1. Sebagai media atau alat untuk mengkomunikasikan informasi keuangan PKBL kepada para pemakai yang akan menggunakan informasi tersebut nantinya guna mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi sesungguhnya.
2. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan PKBL
3. Media untuk mengevaluasi kondisi keuangan PKBL, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan PKBL, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan yang berlaku
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban pengurus dan manajemen yang terkait dengan kinerja dan kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya perusahaan yang telah diamanatkan.

Sesuai dengan peraturan Per-05/MBU/2007, Laporan keuangan yang disusun oleh unit PKBL perusahaan harus dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan, untuk laporan triwulanan. Sedangkan untuk laporan tahunan termasuk laporan keuangan (*audited*) dilaporkan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun

anggaran yang bersangkutan. Laporan keuangan ini disajikan secara terpisah dari laporan keuangan tahunan perusahaan BUMN Pembina.

Tentunya dalam menyajikan laporan keuangan, staf PKBL Perum Jamkrindo Surabaya menetapkan kebijakan akuntansi agar laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan peraturan perundangan terkait program kemitraan dan bina lingkungan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasar pedoman akuntansi PKBL BUMN Revisi tahun 2012, laporan keuangan PKBL Perum Jamkrindo Surabaya sesuai telah memuat:

1. Realisasi pelaksanaan PKBL yang dirinci menurut wilayah binaan yang telah terdapat dalam lampiran laporan keuangan yang disajikan
2. Realisasi anggaran PKBL, terdiri atas sumber dana, dana yang tersedia, dan realisasi penggunaan dana sesuai dengan pelaksanaan PKBL
3. Perhitungan pendapatan dan Beban Program Kemitraan, tertera dalam laporan aktivitas yang telah disajikan
4. Neraca Program Kemitraan. Dalam laporan yang disajikan oleh staf PKBL Perum Jamkrindo Surabaya, neraca dilaporkan dengan nama laporan posisi keuangan
5. Perkembangan usaha Mitra Binaan. Namun Perum Jamkrindo Surabaya tidak melampirkan laporan perkembangan mitra binaannya, karena mitra binaannya terlalu banyak, dan memang Perum Jamkrindo tidak melakukan memonitoring ke seluruh binaannya.

6. Masalah yang dihadapi dan langkah-langkah penyelesaiannya. Dalam laporan yang disajikan oleh staf PKBL Perum Jamkrindo, tidak melampirkan masalah-masalah yang dihadapi selama pelaksanaannya, begitu pula dengan penyelesaian-penyelesaiannya.

Dalam pelaporannya, staf PKBL Perum Jamkrindo Surabaya menyusun semua komponen laporan keuangan PKBL, kemudian laporan tersebut diajukan kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan kemudian dievaluasi. Jika terdapat revisi yang harus dilakukan, maka staf PKBL merevisi laporan tersebut dan kemudian diajukan kembali kepada Kepala Bagian Adminstrasi dan Keuangan. Setelah disetujui, kemudian laporan tersebut diajukan ke Kepala Cabang Perum Jamkrindo Surabaya untuk di-*acc*. Jika laporan keuangan telah di-*acc*, kemudian laporan tersebut dikirim ke Kantor Pusat Jamkrindo. Nantinya, setelah sampai di kantor pusat dan telah disetujui, laporan keuangan PKBL Perum Jamkrindo akan dikirimkan ke Kementrian Negara BUMN.

Dalam penyusunan laporan keuangan PKBL dilakukan pengukuran dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan (*The Cost-of-Outlay Approach*). Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Glautier dan Underdown (2001), dalam pendekatan ini informasi atas aktivitas sosial yang disajikan dikuantifikasikan dalam bentuk uang sehingga laporan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan laporan tahun ke tahun.

4.4.2. Komponen Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Laporan Keuangan PKBL terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, sesuai dengan yang disebutkan dalam Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan PSAK 45 paragraf 3.

4.4.2.1.Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan PKBL ini hampir sama dengan Neraca Keuangan pada umumnya, hanya di laporan ini tidak adanya akun ekuitas. Laporan Posisi Keuangan PKBL menunjukkan sumber daya yang dimiliki oleh unit PKBL Perum Jamkrindo Surabaya sebagai BUMN Pembina seperti aktiva, liabilitas. Akun aktiva dalam laporan ini terdiri atas 3 bagian, yaitu aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lain-lain. Sedangkan pada akun kewajiban, terdiri atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Hal ini sesuai dengan Pedoman Akuntansi PKBL BUMN revisi 2012 yang menyebutkan bahwa tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Laporan Posisi Keuangan yang disusun oleh Perum Jamkrindo Surabaya telah mencakup akun-akun seperti kas, setara kas, persediaan, putang, investasi, aktiva tetap, aktiva lain-lain, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan asset netto (lihat tabel 4.6). Sesuai pula dengan Pedoman Akuntansi PKBL BUMN, dalam Laporan Posisi Keuangan PKBL Perum Jamkrindo Surabaya, aktiva telah dikelompokkan ke dalam aktiva lancar dan tidak lancar.

Tabel 4.6
Laporan Posisi Keuangan PKBL
Perum Jamkrindo Kanca Surabaya Posisi per 31 Oktober 2014

LAPORAN POSISI KEUANGAN				
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN				
PERUM JAMINAN KREDIT INDONESIA				
CABANG SURABAYA				
POSISI PER 31 OKTOBER 2014 DAN 2013				
(Dalam Satuan Rupiah)				
URAIAN	CATT.	31-Oct-14	31-Dec-12	
AKTIVA				
AKTIVA LANCAR				
Kas dan Setara Kas				
Kas	1.	25,353,072.22	644,883.77	
Bank	1.	439,818,721.14	492,016,219.11	
Deposito		-	-	
Persediaan		-	-	
Piutang				
Piutang Penyisihan Laba Kepada BUMN Pembina	2.	-	-	
Piutang Penyaluran Kepada BUMN Pembina Lain		-	-	
Lembaga Penyalur		-	-	
Piutang Sewa Beli Syariah		-	-	
Alokasi Penyisihan Piutang Sewa Beli Syariah		-	-	
Piutang Pendapatan Bagi Hasil		-	-	
Piutang Pinjaman Khusus		-	-	
Alokasi Penyisihan Piutang Pinjaman Khusus		-	-	
Piutang Pinjaman Mitra Binaan		585,677,449.91	1,683,696,787.31	
Alokasi Penyisihan Piutang Pinjaman Mitra Binaan		(144,365,067.36)	(115,210,495.46)	
Piutang Lain-lain		441,312,382.55	1,568,486,291.85	
Investasi		-	-	
Beban Dibayar Dimuka		-	-	
Pembayaran Bagi Hasil		-	-	
Pajak Dibayar Dimuka		-	-	
Pembangunan Dalam Penyelesaian (BUMN Bangun Desa)		-	-	
Piutang Antar Program		-	-	
JUMLAH AKTIVA LANCAR (1)		906,484,175.91	2,061,147,394.73	
AKTIVA TETAP				
Inventaris dan Peralatan		2,640,000.00	2,640,000.00	
Akumulasi Penyusutan Inventaris dan Peralatan		(2,639,999.00)	(2,639,999.00)	
Kendaraan		-	-	
Akumulasi Penyusutan Kendaraan		-	-	
Bangunan		-	-	
Akumulasi Penyusutan Bangunan		-	-	
Tanah		-	-	
JUMLAH AKTIVA TETAP (2)		-	-	
AKTIVA LAIN-LAIN				
Kas dan Bank Yang Dibatasi Penggunaannya		-	-	
Aktiva Tetap Tidak Berfungsi		-	-	
Dana Penjamin KUM-LTA		-	-	
Piutang Bermasalah		113,507,293.77	119,507,293.77	
Alokasi Penyisihan Piutang Pinjaman Bermasalah		(113,555,871.22)	(129,507,293.77)	
		(48,577.45)	(10,000,000.00)	
JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN (3)		(48,577.45)	(10,000,000.00)	
JUMLAH AKTIVA (4)=(1)+(2)+(3)		906,435,598.46	2,051,147,394.73	
KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Hutang jangka Pendek		-	-	
Biaya Yang Masih Harus Dibayar		-	-	
Hutang Pajak		-	-	
Bag. Lancar Hutang Jk Pjg kpd BUMN Pembina Lain		-	-	
Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang		-	-	
Kelebihan Pembayaran Angsuran		-	-	
Angsuran Belum Teridentifikasi		-	-	
Hutang Antar Program		-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (5)		-	-	
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Hutang Sewa Guna Usaha		-	-	
Hutang jangka Panjang kepada BUMN Pembina Lain		-	-	
Hutang jangka Panjang Lainnya		-	-	
JUMLAH HUTANG JANGKA PANJANG (6)		-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN (7) = (5) + (6)		-	-	
AKTIVA BERSIH				
AKTIVA BERSIH TIDAK TERIKAT		906,435,598.46	2,051,147,394.73	
AKTIVA BERSIH TERIKAT		-	-	
JUMLAH AKTIVA BERSIH (8)		906,435,598.46	2,051,147,394.73	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH (9)=(7)+(8)		906,435,598.46	2,051,147,394.73	

Sumber: Data internal perusahaan

Sedangkan dalam penyajian likuiditas, disajikan berdasarkan urutan likuiditas, dan liabilitas berdasarkan tanggal jatuh temponya yaitu jangka pendek dan jangka panjang. klasifikasi mengenai aktiva, liabilitas dan aktiva bersih yang dimiliki oleh unit PKBL Perum Jamkrindo Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Aktiva, berupa sumber daya yang dimiliki oleh unit PKBL dari hasil transaksi-transaksi periode-periode sebelumnya yang manfaat ekonomisnya dapat diperoleh di masa yang akan datang. Aktiva ini berupa:

b. Aktiva Lancar

Sumber daya unit PKBL yang dapat direalisasikan dalam kurun waktu 12 bulan setelah periode pelaporan berakhir dan dapat diperdagangkan ataupun dimanfaatkan untuk aktivitas operasional PKBL Perum Jamkrindo Surabaya. Adapun aktiva lancar dalam laporan posisi keuangan yang disajikan terdiri dari akun-akun sebagai berikut:

1) Kas dan Setara Kas

Dalam akun ini terdiri dari kas, bank dan deposito yang jatuh temponya 3 bulan atau kurang dan tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

2) Persediaan

Merupakan persediaan khusus milik unit PKBL, biasanya berupa persediaan yang akan dibagikan dalam program Bina Lingkungan. Namun biasanya akun persediaan berjumlah nol, karena persediaan biasanya dibeli mendekati hari pelaksanaan program.

3) Piutang

Akun ini terdiri dari tujuh jenis piutang. Pertama, yaitu piutang penyisihan laba kepada BUMN Pembina adalah jumlah piutang yang dimiliki oleh Perum Jamkrindo Surabaya atas penyisihan laba yang telah disepakati oleh kantor pusat. Kedua, piutang penyaluran dana kepada BUMN lain yang merupakan piutang atas pelaksanaan PKBL bersama dengan BUMN Pembina lainnya. Piutang selanjutnya adalah piutang sewa beli syariah, piutang bagi hasil dan piutang pinjaman khusus yang merupakan piutang yang dihasilkan dari transaksi-transaksi terkait. Kemudian piutang pinjaman mitra binaan yang merupakan jumlah pinjaman yang dipinjamkan kepada mitra binaan melalui Program Kemitraan, serta akun piutang lain-lain adalah piutang yang dihasilkan dari transaksi-transaksi diluar kegiatan PKBL. Terdapat pula alokasi penyisihan piutang yang terbagi dari masing-masing jenis pinjaman yaitu sewa beli syariah, pinjaman khusus, dan pinjaman mitra binaan dari Program Kemitraan.

4) Investasi

Merupakan investasi yang terdiri dari dana deposito PKBL yang memiliki jangka waktu lebih dari tiga bulan.

5) Beban Dibayar di Muka

Akun ini merupakan pembayaran atas jasa terkait kegiatan PKBL Perum Jamkrindo Surabaya kepada pihak lain yang belum menjadi beban untuk periode berjalan. Beban ini diakui dan diukur pada saat dilakukan pembayaran atas nilai jasa yang belum dikonsumsi selama tahun berjalan.

6) Pembangunan Dalam Penyelesaian (BUMN Bangun Desa)

Jumlah dana yang dimiliki Perum Jamkrindo Surabaya untuk disalurkan dalam program Bina Lingkungan BUMN Peduli melalui kegiatan BUMN Bangun Desa

7) Piutang Antar Program

Piutang yang dihasilkan dari pelaksanaan program-program atau dengan kantor cabang lain.

c. Aktiva Tetap

Merupakan sumber daya berwujud yang dimiliki oleh unit PKBL Perum Jamkrindo Surabaya yang tidak untuk diperdagangkan dan dapat digunakan untuk kegiatan operasional PKBL, serta memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Dalam laporan posisi keuangan yang telah disusun, aktiva tetap terdiri dari; inventaris dan persediaan, kendaraan, bangunan dan tanah.

d. Aktiva lain-lain

Aktiva lain-lain dalam laporan ini merupakan akumulasi dari kas/bank yang dibatasi penggunaannya, aktiva tetap yang tidak berfungsi, dana penjamin KUM-LTA, dan piutang bermasalah.

1) Kas/bank yang Dibatasi Penggunaannya

Kas/bank yang dimiliki unit PKBL yang penggunaannya tergantung keputusan Menteri Negara BUMN, penggunaannya diakui pada saat terjadinya transaksi penyalangan kas/bank untuk program BL BUMN Peduli dan diukur sebesar nilai yang disisihkan tersebut.

2) Aktiva Tetap Tidak Berfungsi

Aktiva tetap yang direklasifikasi menjadi aktiva tetap tidak berfungsi ini disusutkan sampai dengan nilai sisa (residu) Rp1,00 (satu rupiah).

3) Dana penjamin KUM-LTA

Merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan kemudahan bagi usaha kecil calon mitra binaan dalam memperoleh pinjaman perbankan dengan memberikan deposit sebagai jaminan Program Kemitraan di bank pemerintah.

4) Piutang Bermasalah

Merupakan piutang pinjaman macet dari Program Kemitraan yang telah diupayakan pemulihannya namun tetap tidak dapat dipulihkan. Piutang bermasalah diukur dan dicatat sebesar jumlah pokok pinjaman sedangkan penyisihannya diukur sebesar 100%.

2. Kewajiban

Utang yang dimiliki unit PKBL Perum Jamkrindo Surabaya yang harus dibayarkan dengan sumber daya yang dimiliki. Sama seperti neraca pada umumnya, kewajiban dikasifikasikan menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban yang harus dibayarkan dengan jangka waktu kurang dari atau sama dengan 12 bulan setelah berakhirnya periode laporan. Dalam laporan ini kewajiban jangka pendek terdiri dari; utang jangka pendek, biaya yang masih harus dibayar, utang pajak, bagian lancar utang jangka panjang kepada BUMN Pembina lain, bagian lancar utang jangka panjang,

kelebihan pembayaran angsuran, angsuran belum teridentifikasi dan utang antar program. Pada periode per 31 Oktober 2014 unit PKBL Perum Jamkrindo tidak memiliki kewajiban jangka pendek.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban yang harus dibayarkan dalam jangka waktu penyelesaian lebih dari 12 bulan setelah berakhirnya periode laporan keuangan. Kewajiban ini terdiri atas utang sewa guna usaha, utang jangka panjang kepada BUMN Pembina lain, dan utang jangka panjang lainnya. Pada periode per 31 Oktober 2014 unit PKBL Perum Jamkrindo tidak memiliki kewajiban jangka panjang.

3. Aktiva Bersih

Jumlah aktiva bersih didapat dari selisih antara aktiva dan kewajiban kemudian diklasifikasikan sebagai aktiva bersih terikat dan tidak terikat.

4.4.2.2. Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas adalah salah satu bagian dari laporan keuangan PKBL yang wajib untuk disajikan oleh BUMN Pembina. Dalam laporan ini telah disajikan perubahan aktiva netto yang dimiliki oleh unit PKBL Perum Jamkrindo Surabaya pada satu periode. Jumlah perubahan aktiva netto ini juga dapat dilihat pada aktiva netto di laporan posisi keuangan PKBL.

Laporan aktivitas Perum Jamkrindo Surabaya secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.7. Laporan aktivitas yang disusun oleh staf PKBL Perum Jamkrindo Surabaya terdiri dari dua pos yaitu pos penambah dan pos pengurang. Pos penambah penerimaan, pendapatan dan penyisihan dan yang kedua yaitu penyaluran. Kemudian pos pengurang terdiri dari beban dan pengeluaran penyaluran, pos luar biasa, dan penyisihan BUMN Peduli.

1. Penerimaan, pendapatan dan penyisihan

a. Penerimaan

Akun penerimaan ini terdiri dari alokasi bagian laba dari BUMN Pembina, penerimaan pelimpahan dana dari unit PKBL lain, penggantian beban operasional dan sumbangan.

1) Alokasi Bagian Laba dari BUMN Pembina

Merupakan jumlah dana yang disetujui oleh kantor pusat dan diberikan kepada unit PKBL Perum Jamkrindo Kanca Surabaya.

2) Penerimaan Pelimpahan Dana dari Unit PKBL Lain, yang merupakan dana pelimpahan dari unit PKBL lain

3) Penggantian Beban Operasional

Dana yang diterima atas penggantian beban operasional dari BUMN Pembina atas beban operasional unit PKBL yang melebihi batas yang telah ditetapkan. Beban operasional disini adalah beban pelaksanaan operasi unit PKBL diluar beban pegawai yang dananya berasal dari dana hasil jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dana Program Kemitraan selama tahun berjalan.

4) Sumbangan

Merupakan pelimpahan atau hibah dari pihak lain kepada unit PKBL Perum Jamkrindo dan dicatat sebesar nilai sumbangan atau nilai wajar barang yang diterima.

b. Pendapatan

Merupakan aliran kas masuk yang dihasilkan dari kegiatan operasional PKBL pada periode tersebut. Pendapatan dalam laporan aktivitas ini terdiri dari pendapatan jasa administrasi, bagi hasil, sewa beli syariah, bunga, jasa giro, pendapatan lainnya dari Program Kemitraan, dan pendapatan lain-lain.

c. Penyisihan

Penyisihan terbagi atas alokasi dana BUMN Peduli, ABT-Berakhir pemenuhan program dan ABT-Berakhir waktu. Pada periode per 31 Oktober 2014 PKBL Perum Jamkrindo Surabaya tidak memiliki dana penyisihan.

2. Penyaluran, beban dan pengeluaran penyaluran

a. Penyaluran

Merupakan jumlah dana yang disalurkan dalam Program Kemitraan maupun Bina Lingkungan. Dana penyaluran dalam laporan aktivitas ini dilaporkan menjadi tiga akun yaitu dana pembinaan kemitraan, penyaluran bina lingkungan dan pelimpahan dana ke unit PKBL lain.

b. Beban dan pengeluaran

Terdiri dari beban-beban dari pelaksanaan operasional PKBL diluar penyaluran dana, yaitu beban pembinaan, upah tenaga harian, administrasi dan umum, pemeliharaan, sewa, penyusutan aktiva tetap, penyisihan piutang, pajak serta beban dan pengeluaran lainnya.

3. Pos luar biasa

Pos luar biasa dalam laporan aktivitas terdiri dari keuntungan/kerugian penjualan/penghapusan aktiva tetap, pendapatan luar biasa dan beban luar biasa. Pada periode per 31 Oktober 2014 PKBL Perum Jamkrindo Surabaya tidak memiliki pos luar biasa.

4. Penyisihan BUMN Peduli

Terdiri atas ABT-Penyisihan BUMN Peduli dan ABT-Terbebaskan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada penyaluran BUMN Peduli pada periode per 31 Oktober 2014.

Tabel 4.7
Laporan Aktivitas PKBL Perum Jamkrindo Kanca Surabaya
Periode per 31 Oktober 2014

LAPORAN AKTIVITAS			
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN			
PERUM JAMINAN KREDIT INDONESIA			
CABANG SURABAYA			
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 OKTOBER 2014 dan 2013			
(Dalam Satuan Rupiah)			
URAIAN	CATATAN	31-Oct-14	31-Dec-13
PENERIMAAN, PENDAPATAN DAN PENYISIHAN			
PENERIMAAN			
Alokasi Bagian Laba dari BUMN Pembina		(207,340,000.00)	740,000,000.00
Penerimaan Pelimpahan Dana dari Unit PKBL Lain		-	-
Penggantian Beban Operasional		-	-
Sumbangan		-	-
JUMLAH PENERIMAAN (1)		(207,340,000.00)	740,000,000.00
PENDAPATAN			
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman		24,002,698.43	92,885,686.51
Pendapatan Bagi Hasil		-	-
Pendapatan Sewa Beli Syariah		-	-
Pendapatan Bunga		-	-
Pendapatan Jasa Giro		8,587,057.34	6,642,765.70
Pendapatan Lainnya-PK		-	-
Pendapatan Lain-lain		-	5,951,421.53
JUMLAH PENDAPATAN (2)		32,589,755.77	105,479,873.74
PENYISIHAN			
Alokasi Dana BUMN Peduli		-	-
ABT - Berakhir Pemenuhan Program		-	-
ABT - Berakhir Waktu		-	-
JUMLAH PENYISIHAN (3)		-	-
JUMLAH PENERIMAAN, PENDAPATAN DAN PENYISIHAN			
(4)=(1)+(2)+(3)		(174,750,244.23)	845,479,873.74
PENYALURAN, BEBAN DAN PENGELUARAN PENYALURAN			
PENYALURAN			
Dana Pembinaan Kemitraan		-	-
Penyaluran Bina Lingkungan		205,886,800.00	640,427,115.00
Pelimpahan Dana ke Unit PKBL Lain		900,000,000.00	-
JUMLAH PENYALURAN (5)		1,105,886,800.00	640,427,115.00
BEBAN DAN PENGELUARAN			
Beban Pembinaan		6,248,440.00	15,137,111.00
Beban Upah Tenaga Harian		-	-
Beban Administrasi dan Umum		610,000.00	1,016,000.00
Beban Pemeliharaan		-	-
Beban Sewa		-	-
Beban Penyusutan Aktiva Tetap		-	-
Beban Penyisihan Piutang		29,581,087.00	30,815,220.54
Beban Pajak		75,000.00	-
Beban dan Pengeluaran Lainnya		27,000,000.00	60,000.00
JUMLAH BEBAN DAN PENGELUARAN (6)		63,514,527.00	47,028,331.54
JUMLAH PENYALURAN, BEBAN DAN PENGELUARAN			
(7)=(5)+(6)		1,169,401,327.00	687,455,446.54
POS LUAR BIASA			
Keuntungan (Kerugian) Penjualan/Penghapusan Aktiva Tetap		-	-
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
JUMLAH POS LUAR BIASA (8)		-	-
KENAIKAN/PENURUNAN AKTIVA BERSIH TIDAK TERIKAT		(1,344,151,571.23)	158,024,427.20
(9) = (4) - (7) + (8)			
PENYISIHAN BUMN PEDULI			
Aktiva Bersih Terikat - Penyisihan BUMN Peduli		-	-
Aktiva Bersih Terikat - Terbebaskan		-	-
KENAIKAN / (PENURUNAN) AKTIVA BERSIH TERIKAT (10)		-	-
KENAIKAN / (PENURUNAN) AKTIVA BERSIH (11)=(9)+(10)		(1,344,151,571.23)	158,024,427.20
AKTIVA BERSIH PADA AWAL PERIODE (12)		2,247,587,169.68	2,089,562,742.48
AKTIVA BERSIH PADA AKHIR PERIODE (13) = (11) + (12)		903,435,598.45	2,247,587,169.68

Sumber: Data internal perusahaan

4.4.2.3. Laporan Arus Kas

Laporan ini menyajikan jumlah penerimaan dan pengeluaran kas unit PKBL Perum Jamkrindo Surabaya dalam satu periode. Penerimaan dan pengeluaran kas terbagi atas tiga aktivitas yaitu aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas yang disusun oleh staf PKBL Perum Jamkrindo Surabaya menggunakan *direct method* dan telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi PKBL Revisi 2012. (Lihat tabel 4.8). namun pada laporan arus kas per 31 Oktober yang telah dibuat, arus kas PKBL hanya berasal dari aktivitas operasi yang berarti tidak ada aliran kas masuk tau pun keluar dari aktivitas investasi maupun pendanaan.

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi terutama bersumber dari aktivitas penghasilan utama pendapatan unit PKBL. Informasi didalamnya berguna untuk memprediksi arus kas operasi masa depan. Dalam pelaksanaan PKBL Perum Jamkrindo Surabaya, arus kas hanya berasal dari aktivitas operasi.

2. Arus Kas dari aktivitas Investasi

Pada bagian ini, memisahkan arus kas dari bagian investasi karena arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.

3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan disajikan secara terpisah untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok dana.

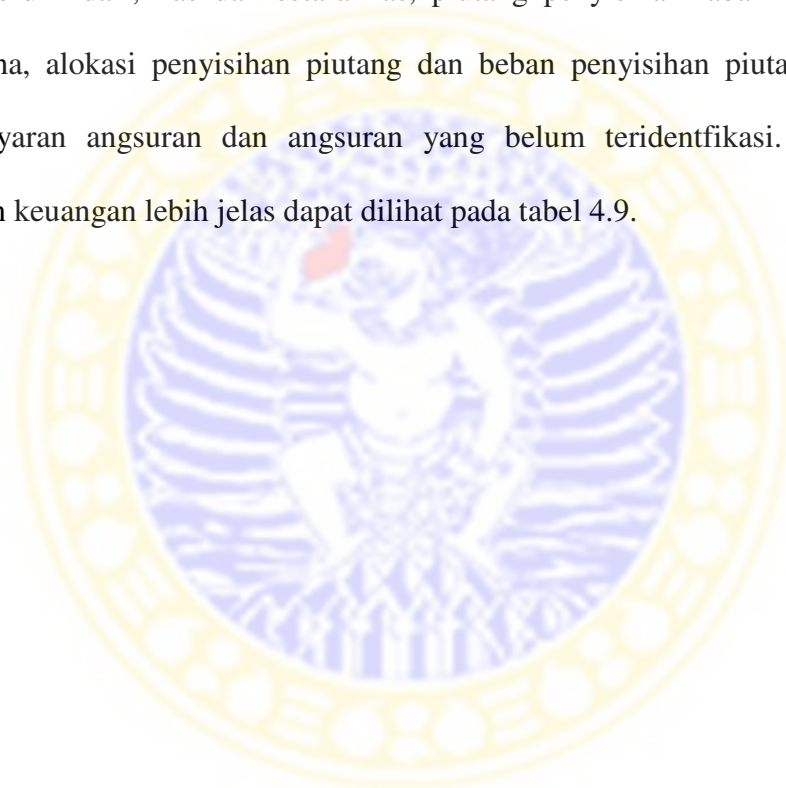
Tabel 4.8
Laporan Arus Kas PKBL Perum Jamkrindo Kanca Surabaya
Posisi per 31 Oktober 2014

LAPORAN ARUS KAS			
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN			
PERUM JAMINAN KREDIT INDONESIA			
CABANG SURABAYA			
Untuk Periode yang Berakhir tanggal 31 OKTOBER 2014 dan 2013			
(Dalam Satuan Rupiah)			
	CATATAN	2014	2013
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI :			
KAS DITERIMA DARI :			
Penerimaan Dana BUMN Pembina		-	740,000,000.00
Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan		345,010,201.57	1,284,009,135.82
Pengembalian Pinjaman Khusus		-	-
Penerimaan Pokok Sewa Beli Syariah		-	-
Penggantian Beban Operasional		-	-
Kelebihan Pembayaran Angsuran		-	-
Angsuran Belum Teridentifikasi		-	-
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman		24,002,698.43	93,059,297.62
Pendapatan Sewa Beli Syariah		-	-
Pendapatan Bunga Deposito		-	-
Pendapatan Jasa Giro		8,587,057.34	6,642,765.70
Pendapatan Lainnya - PK		-	-
Koroksi		-	-
Pendapatan Lain-lain		-	-
SUB JUMLAH		377,599,957.34	2,123,711,199.14
KAS DIKELUARKAN UNTUK :			
Penyaluran Pinjaman Kemitraan		345,000,000.00	180,000,000.00
Penyaluran Pinjaman Khusus		-	-
Dana Pembinaan Kemitraan		-	-
Penyaluran Bina Lingkungan		205,886,800.00	640,427,115.00
Pembayaran Dana Penjamin KUM - LTA		-	-
Pembelian Persediaan		-	-
Pembayaran Hutang Jangka Pendek		-	-
Pembayaran Beban Dibayar Dimuka		-	-
Beban Pembinaan		6,248,440.00	15,137,111.00
Beban Upah Tenaga Harian		-	-
Beban Administrasi dan Umum		610,000.00	1,016,000.00
Pembayaran Beban Pemeliharaan		-	-
Pembayaran Beban Sewa		-	-
Pembayaran Pajak		-	-
Pembayaran Termin Pembangunan BUMN Bangun Desa		-	-
Pembayaran Beban dan Pengeluaran Lainnya		-	60,000.00
SUB JUMLAH		557,745,240.00	836,640,226.00
KAS BERSIH YANG DITERIMA (DIKELUARKAN) UNTUK AKTIVITAS OPERASI (1)		(180,145,282.66)	1,287,070,973.14
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI :			
KAS DITERIMA DARI :			
Penerimaan Pokok Bagi Hasil		-	-
Penjualan Aktiva Tetap		-	-
Penerimaan Kembali Investasi		-	-
Pendapatan Bagi Hasil		-	-
Pendapatan Luar Biasa		-	-
SUB JUMLAH		-	-
KAS DIKELUARKAN UNTUK :			
Pembayaran Bagi Hasil		-	-
Pembelian Aktiva Tetap		-	-
Penempatan Investasi		-	-
Pembayaran Beban Luar Biasa		-	-
SUB JUMLAH		-	-
KAS BERSIH YANG DITERIMA (DIKELUARKAN) UNTUK AKTIVITAS INVESTASI (2)		-	-
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN :			
KAS DITERIMA DARI :			
Pengembalian Pinjaman Jangka Panjang		-	-
Pelimpahan Dana dari Unit PKBL Lain		-	-
Aktiva Bersih Terikat Berakhir Pembatasannya		-	-
Sumbangan		-	-
SUB JUMLAH		-	-
KAS DIKELUARKAN UNTUK :			
Penyisihan Program BUMN Peduli		-	-
Penyaluran Program BUMN Peduli		-	-
Pembayaran Hutang Jangka Panjang		-	-
Pelimpahan ke Unit PKBL Lain		-	-
Penyaluran Melalui BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur		-	-
SUB JUMLAH		-	-
KAS BERSIH YANG DITERIMA (DIKELUARKAN) UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN (3)		-	-
KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH DALAM KAS DAN SETARA			
KAS (4)=(1)+(2)+(3)		(180,145,282.66)	1,287,070,973.14
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE (5)		1,779,732,076.02	492,661,102.88
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE (6) = (4)+(5)		1,599,586,793.37	1,779,732,076.02

Sumber: Data Internal Perusahaan

4.4.2.4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan SAK ETAP, membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan tersebut dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Maka unit PKBL Perum Jamkrindo Surabaya membuat catatan atas laporan keuangan yang mengungkap tentang penjelasan lebih detail mengenai pos-pos laporan keuangan yang terdiri dari; kas dan setara kas, piutang penyisihan laba kepada BUMN Pembina, alokasi penyisihan piutang dan beban penyisihan piutang, kelebihan pembayaran angsuran dan angsuran yang belum teridentifikasi. Catatan atas laporan keuangan lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.9.



Tabel 4.9
Catatan Atas Laporan Keuangan PKBL Perum Jamkrindo Kanca Surabaya
Posisi per 31 Oktober 2014

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PERUM JAMINAN KREDIT INDONESIA CABANG SURABAYA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 OKTOBER 2014 DAN 2013						
Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan						
1. Kas dan Setara Kas						
		2014			2013	
Kas dan Setara Kas		FK	BL	JML	FK	BL
Kas		23,222,838.22	2,130,234.00	25,353,072.22	7,023,388.21	1,580,474.00
Bank		408,672,366.31	31,146,354.83	439,818,721.14	1,320,395,837.95	450,733,375.86
Deposito		-	-	-	-	-
Jumlah		431,895,204.53	33,276,588.83	465,171,793.36	1,327,418,226.16	452,313,849.86
2. Piutang Penyisihan Laba kepada BUMN Pembina						
Piutang Penyisihan Laba kepada BUMN Pembina						
2014						
2013						
a. Program Kemitraan						
Alokasi Laba menurut keputusan RUPS/RPB					-	-
Realisasi					-	-
Piutang Penyisihan Laba (1)					-	-
b. Program Bina Lingkungan						
Alokasi Laba menurut keputusan RUPS/RPB					-	-
Realisasi					-	-
Piutang Penyisihan Laba (2)					-	-
Jumlah (1) + (2)					-	-
3. Alokasi Penyisihan Piutang dan Beban Penyisihan Piutang						
Beban Penyisihan Piutang Tahun 2013 dan 2012						
2014						
2013						
Nama Akun					-	-
Beban Penyisihan Piutang Pinjaman Kemitraan					-	-
Beban Penyisihan Piutang Pinjaman Khusus					-	-
Beban Penyisihan Piutang Sewa Beli Syariah					-	-
Jumlah					-	-
PENYISIHAN PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN TAHUN 2013						
Kualitas Pinjaman	Umur Piutang (dr Ji Tempo)	Saldo Piutang	Prosentase Penyisihan	Penyisihan		Beban Penyisihan
				Sep-14	Sep-13	IH 2013
Lancar	s.d. 30 hari	-	0%	-	-	-
Kurang Lancar	> 30 hari <= 180 hari	-	25%	-	-	-
Diragukan	> 180 hari <= 270 hari	-	75%	-	-	-
Macet	>= 270 hari	-	100%	-	-	-
Bermasalah	>270 hari	-	100%	-	-	-
Jumlah		-		-	-	-
PENYISIHAN PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN TAHUN 2012						
Kualitas Pinjaman	Umur Piutang (dr Ji Tempo)	Saldo Piutang	Prosentase Penyisihan	Penyisihan		Beban Penyisihan
				2014	2013	2014
Lancar	s.d. 30 hari	-	0%	-	-	-
Kurang Lancar	> 30 hari <= 180 hari	-	25%	-	-	-
Diragukan	> 180 hari <= 270 hari	-	75%	-	-	-
Macet	>= 270 hari	-	100%	-	-	-
Bermasalah	>270 hari	-	100%	-	-	-
Jumlah		-		-	-	-
4. Kelebihan Pembayaran Angsuran						
Kelebihan Pembayaran Angsuran						
2014						
2013						
Debitur A						
Jumlah angsuran seharusnya						
Jumlah angsuran yang diterima						
Kelebihan pembayaran angsuran (1)						
Debitur B						
Jumlah angsuran seharusnya						
Jumlah angsuran yang diterima						
Kelebihan pembayaran angsuran (2)						
Jumlah (1) + (2)						
5. Angsuran Belum Teridentifikasi						
Angsuran Belum Teridentifikasi						
2014						
2013						
Jumlah angsuran masuk						
Jumlah angsuran teridentifikasi						
Jumlah angsuran belum teridentifikasi						

Sumber: Data internal perusahaan

4.4.2.5. Evaluasi Pelaporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perum Jamkrindo Kantor Cabang Surabaya

Sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), maka terdapat beberapa evaluasi atas peloran yang telah dilakukan oleh unit PKBL Prum Jamkrindo Kantor Cabang Surabaya. Evaluasi tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan yang disajikan sudah lengkap mencakup empat komponen yang disebutkan dalam PSAK 45 Paragraf 3 yaitu laporan posisikeuangan, laporan aktivitas, laoran arus kas, dan catatan atas laporan keuangan
2. Berdasar pada pedoman akuntansi PKBL revisi 2012, penyajian laporan keuangan belum memuat poin 5 dan 6, yaitu tidak melampirkan laporan perkembangan mitra binaannya karena memang unit PKBL tidak melaksanakan monitoring ke seluruh binaannya. Kemudian, tidak dilampirkannya pula masalah-masalah yang dihadapi selama pelaksanaan begitu pula dengan penyelesaiannya.
3. Dalam laporan posisi keuangan, akun kas/bank yang dibatasi penggunaannya dikategorikan dalam aktiva lain-lain. Tetapi menurut SAK ETAP, kas/bank yang dibatasi penggunaannya seharusnya disajikan dalam kelompok aktiva lancar karena siklus operasi yang tidak menentu dan dapat dicairkan sewaktu-waktu tersebut sehingga diasumsikan selama 12 bulan.

4. Penyusunan keempat laporan keuangan yang telah dilakukan oleh staf PKBL Perum Jamkrindo Surabaya telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi PKBL BUMN revisi 2012. Namun pada laporan ini, akun dicantumkan menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
5. Melalui penyajian laporan keuangan PKBL ini, akuntansi sosial telah dilaksanakan oleh Perum Jamkrindo, yaitu melalui pelaporan ini dapat digunakan untuk mengukur dan melaporkan pengaruh kegiatan perusahaan terhadap lingkungannya.

4.5. Evaluasi Pelaporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai CSR

Penyajian laporan keuangan PKBL merupakan bentuk nyata dari pertanggung jawaban sosial perusahaan atau yang disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dengan empat laporan keuangan yang telah disajikan oleh Unit PKBL Perum Jamkrindo, didapat evaluasi sebagai berikut terkait pelaporannya sebagai pertanggungjawaban sosial perusahaan:

1. Perum Jamkrindo telah mampu menyediakan informasi yang sistematis terkait pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan, baik berupa informasi data keuangan yang ada dalam laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas, maupun non keuangan dalam CALK sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap *stakeholders*.

2. Melalui penyajian laporan keuangan ini, maka telah memenuhi prinsip utama dalam penyajian dan pelaporan CSR yaitu prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Dalam empat tahapan penerapan CSR, tahapan yang ke empat yaitu pelaporan telah dilaksanakan melalui pelaporan PKBL oleh Perum Jamkrindo Surabaya. Yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Jadi, selain berfungsi untuk keperluan *shareholders* namun juga untuk *stakeholders* yang memerlukan.

4.6. Evaluasi Pelaksanaan dan Pelaporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam Meningkatkan Citra Perusahaan

Dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur citra. Pendekatan yang pertama adalah merefleksikan citra di benak konsumen menurut pandangan mereka sendiri. Kemudian pendekatan kedua adalah untuk mengukur citra adalah peneliti terlebih dahulu memberikan dimensi yang jelas, kemudian responden merespon terhadap dimensi-dimensi tersebut. Dalam penelitian ini peneliti telah mendatangi mitra binaan dan penerima program bina lingkungan untuk mengetahui pandangan mereka terhadap Perum Jamkrindo Surabaya. Untuk memfokuskan penelitian, dalam observasi yang telah dilaksanakan peneliti menanyakan dampak PKBL yang telah dilaksanakan terhadap usaha dan lingkungan sekitar mereka serta pengetahuan mereka tentang keberadaan Perum Jamkrindo Kanca Surabaya sebelum menerima

dampak dari pelaksanaan PKBL. Melalui wawancara yang telah dilakukan kepada para penerima PK dan BL, mereka sebelumnya banyak tidak mengetahui atau sadar akan kehadiran Perum Jamkrindo Surabaya. Ada pula yang sebenarnya tinggal dan sering melewati lokasi perusahaan namun tidak mengetahui sebenarnya bergerak di bidang apakah Perum Jamkrindo ini, terlebih lagi mengetahui adanya program PKBL. Setelah mendapat bantuan baik dari PK maupun BL, mereka merasa sangat terbantu dan berpandangan baik terhadap keberadaan Perum Jamkrindo. Dapat dikatakan, dengan begitu citra Perum Jamkrindo meningkat setelah dilaksanakannya PKBL ini. Tentunya pendapat dan pandangan mereka sangat berpengaruh terhadap citra perusahaan Perum Jamkrindo Kanca Surabaya. Maka melalui PKBL inilah selain dapat membentuk citra yang baru pada perusahaan dapat pula meningkatkan citra Perum Jamkrindo di mata masyarakat. terbentuknya citra baru maupun adanya peningkatan citra perusahaan melalui pelaksanaan PKBL sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, karena terdapat beberapa faktor pembentuk citra dalam pelaksanaan PKBL.

4.5.1. Faktor Pembentuk Citra Perusahaan Dalam Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perum Jamkrindo Kantor Cabang Surabaya

Telah disebutkan dalam dalam *News of Perhumans* (2004) bahwa ada sembilan aspek dalam membentuk citra perusahaan. Melalui pelaksanaan PKBL oleh Perum Jamkrindo Kanca Surabaya telah mencakup empat aspek yaitu;

kemampuan finansial, tanggung jawab lingkungan, tanggung jawab sosial, dan penegakan *Good Corporate Governance* (GCG).

4.5.1.1. Kemampuan Finansial

Dalam pelaksanaan PKBL yang bersumber dari penyesihan laba perusahaan, jika dilihat dari jumlah mitra binaan program kemitraan dan penerima bantuan bina lingkungan yang dimiliki oleh Perum Jamkrindo Surabaya hingga saat ini, dapat disimpulkan bahwa aspek ini telah terpenuhi. Dalam pelaksanaan Program Kemitraan khususnya, perusahaan telah banyak menyalurkan bantuan dana pinjaman kepada para mitra binaan agar membantu mengembangkan UMKMK di Indonesia.

4.5.1.2. Tanggung Jawab Lingkungan

Tanggung jawab akan lingkungan telah disalurkan oleh Perum Jamkrindo melalui program bina lingkungan. Sebenarnya belum ada kegiatan yang fokus untuk pelestarian alam atau sejenisnya, namun dalam pelaksanaan pembangunan saran/ prasarana umum dan ibadah, dan pembuatan bak penampungan air dalam program BUMN Bangun desa telah membuktikan bahwa Perum Jamkrindo memiliki kesadaran dan kepekaan atas lingkungan sekitarnya.

4.5.1.3. Tanggung Jawab Sosial

Pelaksanaan program Bina Lingkungan juga mencakup aspek tanggung jawab sosial. Dalam pelaksanaan bina lingkungan yang telah dijalankan oleh Perum Jamkrindo Kanca Surabaya cenderung lebih besar kepeduliannya terhadap

sosial jika dibandingkan dengan kepeduliannya terhadap alam sekitar. Hal ini terbukti dari banyaknya program yang telah dilaksanakan dengan menyalurkan bantuan kepada korban bencana alam, santunan, pemberian sembako, pembangunan sarana/prasarana umum dan sarana ibadah, pemberian beasiswa, pembangunan sekolah dan lain-lain yang telah dijelaskan sebelumnya. Kepekaan akan lingkup sosial ini dilaksanakan oleh Perum Jamkrindo Surabaya agar tercipta hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat sekitarnya serta membuktikan kepeduliannya akan sesama.

4.5.1.4. Penegakan *Good Corporate Governance* (GCG)

Laporan keuangan PKBL yang disusun oleh staf PKBL Perum Jamkrindo merupakan wujud penerapan praktik bisnis yang sehat. Penyusunan dan pelaporan keuangan atas tanggung jawab yang merupakan salah satu upaya dalam membentuk citra perusahaan melalui penegakan *Good Corporate Governance*.

4.5.2. Manfaat Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Terhadap Citra Perusahaan Perum Jamkrindo Kantor Cabang Surabaya

Melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Perum Jamkrindo Kanca Surabaya memiliki citra yang baru di mata para mitra binaan program kemitraan dan penerima program bina lingkungan. Berdasarkan teori yang dikemukakan Kasali (2003) bahwa citra perusahaan yang baik dan kuat akan memberikan manfaat kepada perusahaan yaitu; daya saing jangka menengah dan panjang yang mantap (*mid and long sustainable competitive position*), menjadi

perisai selama masa krisis (*an insurance for adverse times*), menjadi daya tarik eksekuti handal (*attracting the best executive available*), meningkatkan efektifitas strategi pemasara (*increasing the effectiveness of marketing instruments*) serta penghematan biaya operasional (*cost saving*).

Citra perusahaan yang terbentuk dari melaksanakan kegiatan PKBL ini memberikan manfaat kepada perusahaan yaitu meningkatkan efektifitas strategi pemasaran (*increasing the effectiveness of marketing instruments*). Setiap pelaksanaan program baik PK maupun BL pasti membawa nama besar Perum Jamkrindo Kanca Surabaya, contohnya dalam program BUMN Bangun Desa yang kemudian dibuat papan bertuliskan “pembangunan prasarana ini sumbangan dari Perum Jamkrindo Surabaya”. Dengan begitu, nama dan citra perusahaan pun akan makin melambung.